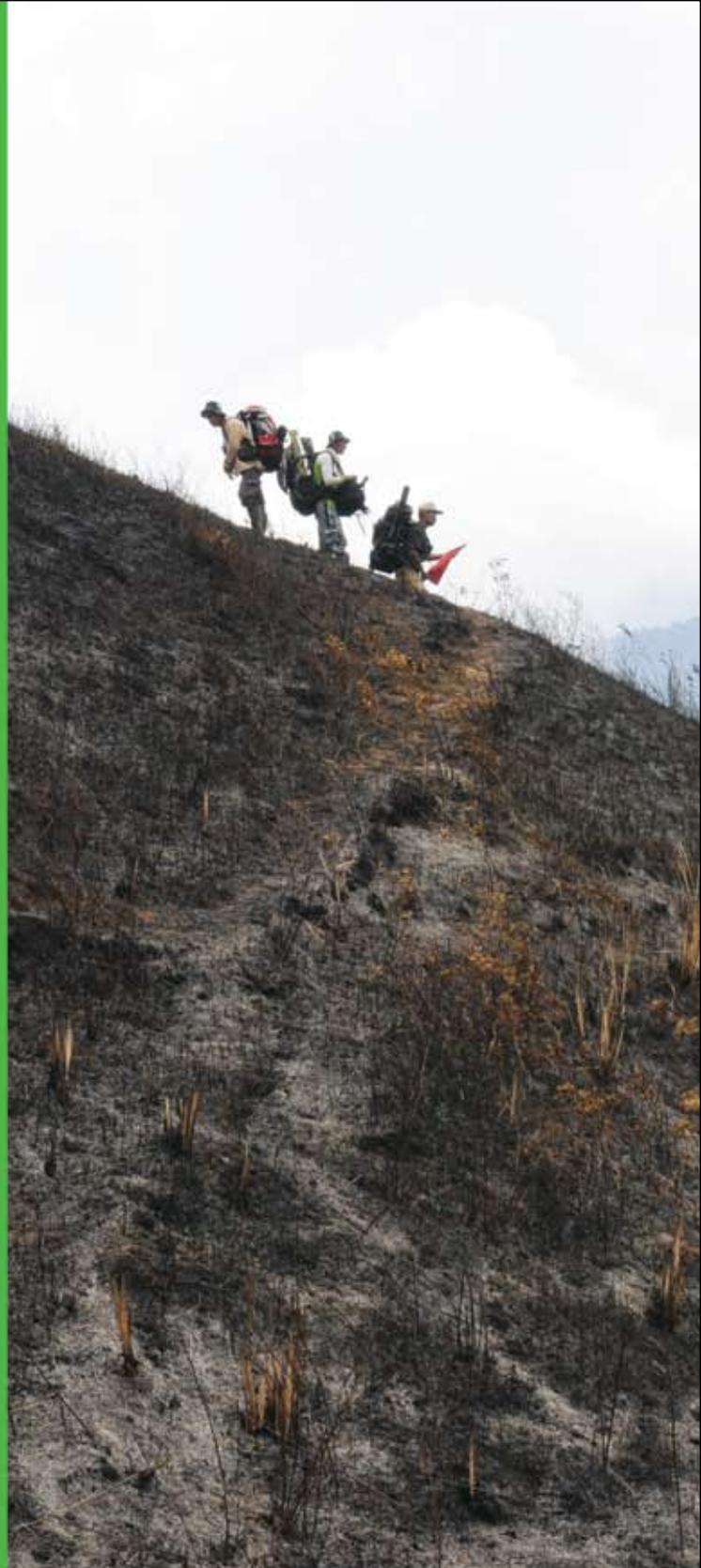


MULTI DONOR FUND FOR ACEH AND NIAS

Investasi pada Institusi- Institusi: Keberlanjutan Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi

Empat Tahun
Pasca Tsunami

LAPORAN KEMAJUAN V DESEMBER 2008



Para Pemenang Lomba Photo Multi Donor Fund 2008



Pemantauan Hutan yang Terbakar

Tim Community Based Monitoring FFI sedang memantau titik munculnya api dan jejak pembakar hutan padang rumput Blang Raweu. Padang Rumput Blang raweu merupakan salah satu habitat hutan savana yang terdapat didalam kawasan Ekosistem Ulumasen yang kerap dibakar oleh pemburu-pemburu rusa. MDF mendanai pelatihan penjaga hutan dan pelaku konservasi sejak 2006.

Foto: Mahdi Ismail - FFI



Membangun jembatan di Aceh Besar

Sejumlah pekerja sedang memperbaiki pengait di jembatan jalan Banda Aceh –Calang. MDF telah mendanai perawatan jalan sepanjang 103 km antara Lamno–Calang untuk menjamin akses darat di jalur tersebut.

Foto: Isea Safril – Wartawan Harian Aceh



Mengepak Plastik Daur Ulang

Seorang pemulung yang telah dilatih keahliannya dalam mengenali jenis dan kualitas plastik, dengan giatnya melakukan pengepakan terhadap sampah daur ulang untuk dijual kembali. Proyek ini merupakan kerjasama Palapa Plastic Recycle dengan Austcare yang merupakan mitra dalam mengimplementasikan proyek UNDP untuk program pengelolaan sampah yang didanai MDF. Program ini memberikan pendapatan harian ke kurang lebih 700 orang.

Foto: Herlina Sjaifudin - UNDP



KANTOR MDF JAKARTA

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Tel: (6221) 5299-3000
Fax: (6221) 5299-3111
www.multidonorfund.org

Dicetak 2009

Volume ini merupakan produk milik Multi Donor Fund

MULTI DONOR FUND FOR ACEH AND NIAS

Investasi pada Institusi- Institusi: Keberlanjutan Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi

Empat Tahun
Pasca Tsunami

LAPORAN KEMAJUAN V DESEMBER 2008

Ucapan Terima kasih

Laporan ini dipersiapkan oleh Sekretariat Multi Donor Fund dengan kontribusi para badan mitra (UNDP, WFP, dan World Bank) dan juga anggota tim proyek.

Sekretariat Multi Donor Fund dipimpin oleh manajer, Shamima Khan, beranggotakan: Sarosh Khan, Safriza Sofyan, Anita Kendrick, Shaun Parker, Lina Lo, Lanny Oktavia, Faisal Siddik, Nia Sarinastiti dan Geumala Yatim.

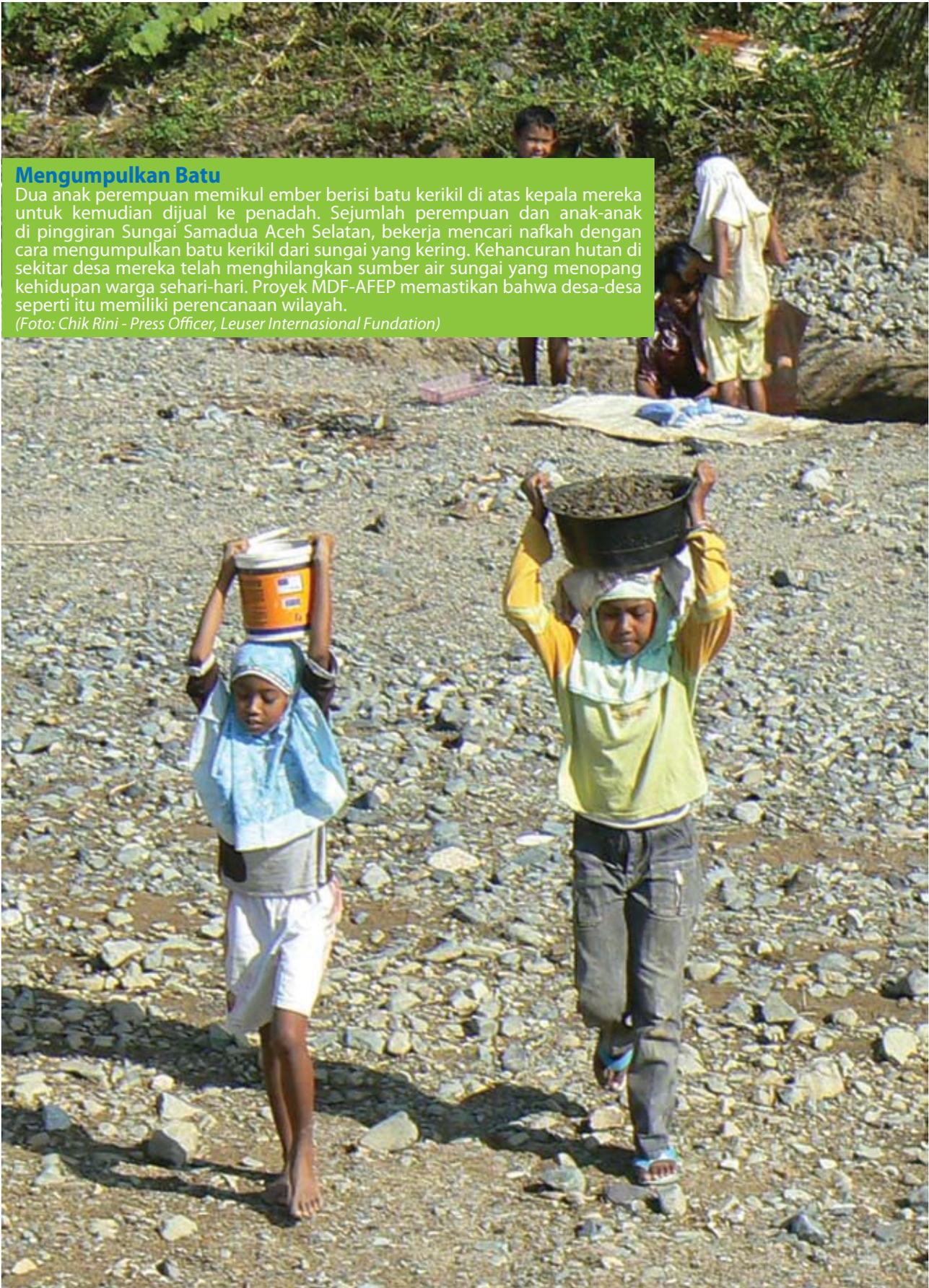
Tim ini didukung oleh Rahayu Novianty, Inge Susilo, Rachmawati Swandari dan Friesca Erwan

Disain dan tata muka: PT Reza Prima
Printer: Lumbung Kencana Makmur

Mengumpulkan Batu

Dua anak perempuan memikul ember berisi batu kerikil di atas kepala mereka untuk kemudian dijual ke penadah. Sejumlah perempuan dan anak-anak di pinggir Sungai Samadua Aceh Selatan, bekerja mencari nafkah dengan cara mengumpulkan batu kerikil dari sungai yang kering. Kehancuran hutan di sekitar desa mereka telah menghilangkan sumber air sungai yang menopang kehidupan warga sehari-hari. Proyek MDF-AFEP memastikan bahwa desa-desa seperti itu memiliki perencanaan wilayah.

(Foto: Chik Rini - Press Officer, Leuser Internasional Fundation)



PESAN DARI PARA KETUA BERSAMA

Multi Donor Fund dibentuk sebagai tanggapan terhadap permintaan Pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi setelah peristiwa bencana tsunami dan gempa bumi. BRR didirikan untuk mengkoordinasikan upaya rekonstruksi Pemerintah Indonesia senilai AS\$7 milyar. Dengan telah selesainya mandat yang ditugaskan, BRR akan tutup pada bulan April 2009. Kemitraan yang erat telah terbina antara MDF dan BRR berdasarkan saling menghargai, tujuan bersama dan pemahaman tentang kompleksitas rekonstruksi dan wilayah kerjanya. Kemitraan ini merupakan aset strategis dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. Dengan adanya BRR dalam pucuk pimpinan MDF, maka BRR dapat mengendalikan arah dalam memprioritaskan penggunaan dana MDF secara strategik dan efektif agar mengisi kebutuhan-kebutuhan dan kesenjangan penting.

Dengan berakhirnya masa BRR, strategi transisi telah dipaparkan, dan bagaimana penerapan strategi ini merupakan pekerjaan kita selanjutnya. Para Ketua Bersama dari Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias sangat gembira bahwa sebuah strategi telah dikembangkan oleh BRR untuk mengalihkan aset-aset rekonstruksi dan proyek-proyek ke pemerintah daerah dan instansi terkait. Multi Donor Fund memberikan bantuan kepada BRR dan pemerintah daerah Aceh dan Nias untuk memastikan bahwa transisi aset dan penguatan ke institusi-institusi dapat terjadi secara lancar agar mampu melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan di wilayahnya. Hal ini akan menunjukkan kemitraan erat yang dibutuhkan dalam upaya mengimplementasikan program-program secara efektif agar berdaya jangka panjang.

Kinerja dari MDF menunjukkan komitmen yang kuat terhadap proses rekonstruksi dan kelanjutannya. Empat tahun setelah tsunami dan gempa bumi menghancurkan Aceh dan Nias, hasil di lapangan menunjukkan bahwa pemulihan masyarakat, terutama perumahan, telah mendekati penyelesaian dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur besar sudah berjalan. Kini saatnya untuk memfokuskan pada pemulihan mata pencaharian.

Multi Donor Fund telah memperpanjang masa tugasnya hingga 2012, dengan demikian akan terus menghadirkan keberhasilan dalam upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan tersebut. Multi Donor Fund akan pula membangun kebersamaan dengan para mitra baru agar dapat menghantarkan misinya untuk meningkatkan kehidupan dari rakyat Aceh dan Nias

Dr. Kuntoro Mangkusubroto
BRR

Ir. Irwandi Yusuf
Gubernur NAD

Joachim von Amsberg
Bank Dunia

Pierre Philippe
Komisi Eropa

PESAN KHUSUS DARI BRR

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Multi Donor Fund dan para anggota yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias dalam jangka waktu hampir empat tahun ini. Kontribusi MDF sangat strategik, finansial maupun teknis.

Dalam tingkat strategik, dukungan dari komunitas internasional untuk bekerja dalam mekanisme tunggal seperti MDF sangat memberi dampak yang menguntungkan. Mekanisme tersebut memberikan satu landasan umum untuk mengkoordinasikan tanggapan-tanggapan dalam hal kebijakan tingkat tinggi dan inisiatif-inisiatif program.

Pada tingkat finansial, menggabungkan dana donor melalui MDF membuka kesempatan untuk menjalankan proyek-proyek skala besar dan menempatkan berbagai ruas penggerak (enablers) penting yang tidak dapat dilakukan bilamana terjadi sebaliknya. Ruas-ruas ini memberikan kepentingan strategis dalam memberikan kesempatan bagi para mitra kerja kami.

Padattingkatteknis, MDF membantudalammemberikanaksesterhadapkeahlian nasional dan internasional yang membantu peningkatan kapasitas kinerja kami dengan standar yang lebih tinggi. Nilai dari kontribusi ini sangat signifikan.

Secara umum, kemitraan dalam MDF telah mampu mengharmonisasikan kontribusi para donor dan hubungan di antara para donor dan Pemerintah Indonesia. Walau tidak mudah, kebersamaan itu sangat penting, Semua tentu telah mengambil hikmahnya.

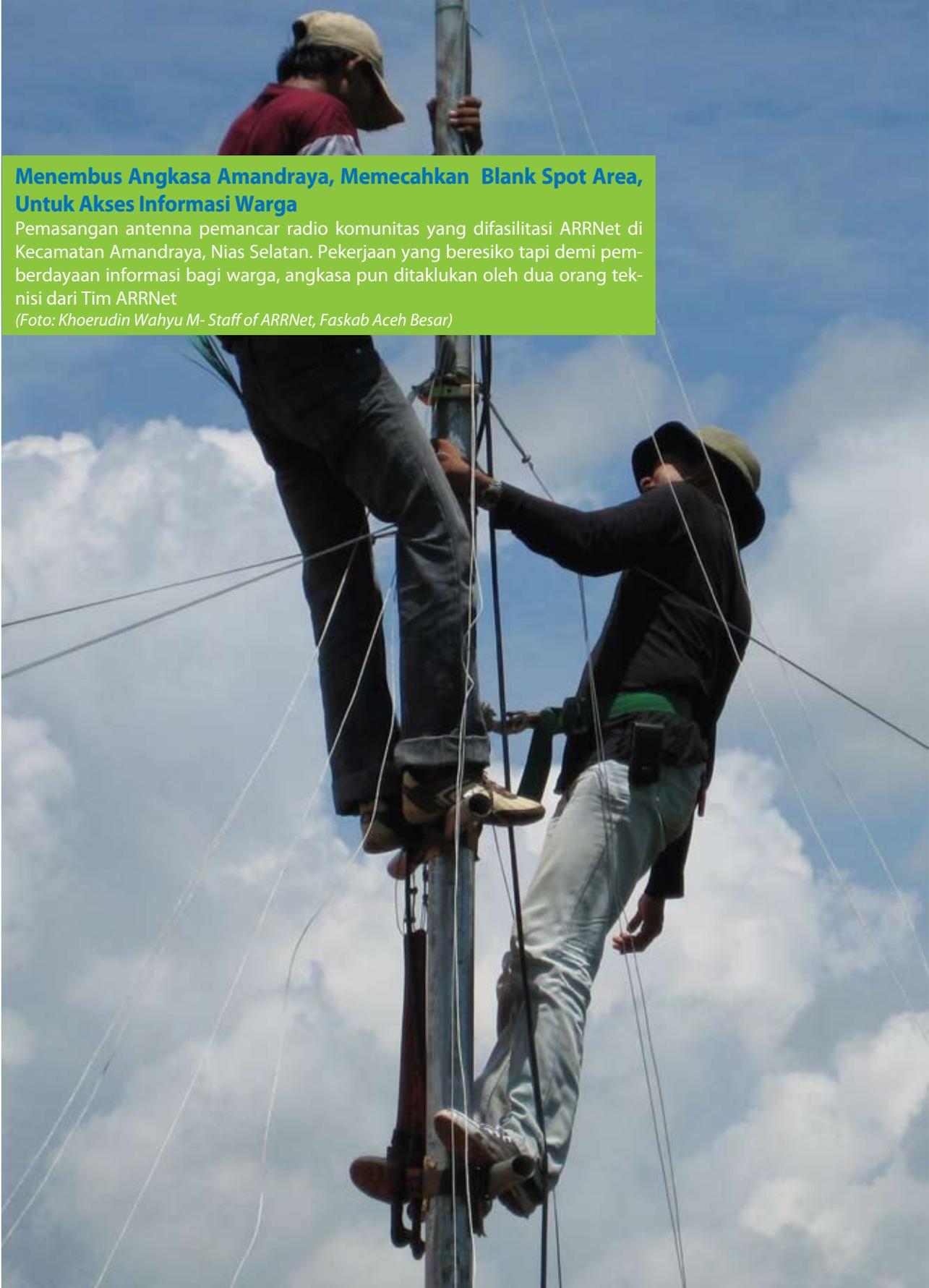
Satu tantangan yang harus dihadapi MDF adalah mengimbangi antara kecepatan dan tanggapan dengan prosedur akuntabilitas. Yang terakhir terkadang memenangi yang pertama dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan tersendiri sampai diterapkan formulasi baru.

Dengan dialihkan peran Ketua Bersama BRR ke BAPPENAS dan persiapan pengakhiran masa tugas, saya mendorong agar pemerintah daerah Aceh dan Nias untuk melanjutkan kerjasama dengan MDF dan tim pendukungnya. Hubungan dengan komunitas internasional sangat penting dalam kelanjutan keberhasilan program pemulihan.

Salam hormat,

Dr. Kuntoro Mangkusubroto
Direktur





Menembus Angkasa Amandraya, Memecahkan Blank Spot Area, Untuk Akses Informasi Warga

Pemasangan antenna pemancar radio komunitas yang difasilitasi ARRNet di Kecamatan Amandraya, Nias Selatan. Pekerjaan yang beresiko tapi demi pemberdayaan informasi bagi warga, angkasa pun ditaklukan oleh dua orang tekni dari Tim ARRNet

(Foto: Khoerudin Wahyu M- Staff of ARRNet, Faskab Aceh Besar)

DAFTAR ISI

Pesan dari Para Ketua Bersama

Pesan Khusus dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Tujuan Operasional dari Multi Donor Fund
Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif
Pencapaian Portofolio
Informasi Keuangan Terkini
Melihat Kedepan: Menanggapi Perubahan Kebutuhan
Sebuah Komitmen untuk Meningkatkan Kualitas dan Kinerja

Bab 1 Memperluas Operasi untuk Meningkatkan Kinerja

Berfokus pada Tujuan Operasional dari Multi Donor Fund
Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif

Bab 2 Pencapaian Portofolio

Pemulihan Masyarakat
Pemulihan Infrastruktur Skala Besar dan Transportasi
Penguatan Tata Kelola
Manajemen Keberlanjutan untuk elestarian Lingkungan Hidup
Pengembangan Perekonomian dan Mata Pencaharian
Program-program yang Saling Terkait dan Mendukung

Bab 3 Laporan Keuangan

Komitmen
Dana yang Tersedia
Alokasi dan Komitmen Pendanaan
Penyaluran Dana
Tindak Selajutnya

Bab 4 Melihat Kedepan Menuju Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Perubahan Konteks Operasional
Portofolio MDF dalam Menanggapi Perubahan Keperluan
Sebuah Komitmen untuk Meningkatkan Kualitas dan Kinerja

Lampiran

Portofolio Proyek
Lembaran Info Proyek

Pembersihan Sawah

Seorang staf lapangan UNDP sedang membantu masyarakat untuk mengukur tanah setelah pembersihan sehingga perbatasan dapat ditentukan. Melalui program pengelolaan sampah tsunami yang didanai MDF, UNDP menggarap pembersihan sawah dari sisa serpihan tsunami di Aceh. Program ini membantu mata pencaharian masyarakat di sektor pertanian.

(Foto: Faisal Ridwan)



EXECUTIVE SUMMARY

Multi Donor Fund for Aceh and Nias (MDF) dibentuk oleh sekelompok donor internasional sebagai tanggapan terhadap permintaan Pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi dan mendukung rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias setelah bencana tsunami dan gempa bumi pada akhir 2004 dan awal 2005. MDF memiliki dana sekitar US \$ 692 juta dari 15 donor multilateral dan bilateral.

Tujuan Operasional dari Multi Donor Fund

Multi Donor Fund mendukung Rencana Induk Pemerintah Indonesia dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

MDF didukung oleh mitra pemerintah, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR) dalam pelaksanaannya. Kebijakan Bantuan Pemulihan MDF berfungsi sebagai kerangka kerja untuk operasional MDF, di mana Sekretariat mengkoordinasikan dan melaporkan kinerja operasional dari portofolio. Proses persetujuan di MDF memastikan bahwa portofolio sejalan dengan prioritas pemerintah untuk rekonstruksi.

BRR telah melaksanakan mandatnya sesuai dengan Rencana Induk dan akan berakhir pada 2009.

Berakhirnya masa tugas BRR mempengaruhi operasi dari Multi Donor Fund pada berbagai tingkat. Hal ini termasuk pengaturan yang berkaitan dengan perwakilan pada tingkat Ketua Bersama dan Komite Pengarah, dan pengaturan pelaksanaan untuk enam proyek yang akan terus berlanjut setelah BRR berakhir. Disamping itu, MDF memberikan dukungan baik kepada BRR dan pemerintah lokal dalam mempersiapkan penyerahan aset-aset rekonstruksi dan proyek-proyek ke badan-badan yang relevan.

Sementara proses rekonstruksi berjalan, prioritas telah bergeser dari rekonstruksi darurat ke upaya investasi rekonstruksi yang berkesinambungan dan mendorong perkembangan ekonomi.

Untuk menjamin keberlanjutan program, di tahun 2008 MDF memprioritaskan upayanya pada dua bidang: (1) mendukung transisi dari BRR ke pemerintah daerah, dan (2) meningkatkan pembangunan ekonomi jangka panjang di Aceh dan Nias.

Masa tugas Multi Donor Fund telah diperpanjang hingga Desember 2012 untuk menjamin bahwa pelaksanaan dapat memenuhi kebutuhan penting rekonstruksi.

Perpanjangan ini memungkinkan MDF untuk memastikan bahwa pemulihan akan berlanjut secara kelembagaan, finansial dan sosial, dan akan memberikan kesempatan pada MDF untuk terus memainkan peranan penting dan beragam dalam pemulihan Aceh dan Nias.

Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif

Multi Donor Fund memainkan peran koordinasi dengan pihak-pihak penting pada berbagai tingkatan.

Sejak tahun lalu, MDF telah memfasilitasi proses penjabaran sektor prioritas guna memprogramkan dana yang tersisa sesuai dengan revisi Rencana Induk Pemerintah untuk rekonstruksi Aceh dan Nias. Sektor yang diajukan untuk mendapatkan pendanaan tambahan adalah infrastruktur dan pengembangan ekonomi dengan penekanan pada kegiatan peningkatan kapasitas.

Multi Donor Fund mendukung keterlibatan berbagai pihak dalam proses rekonstruksi.

Melalui perangkat komunikasi seperti dialog wacana dan integrasi media, komunikasi tentang kegiatan MDF mendorong kesadaran publik yang lebih luas akan kebutuhan dan upaya rekonstruksi. Mengelola umpan balik melalui penanganan keluhan dan Rencana Aksi Anti Korupsi (Anti Corruption Action Plan-ACAP) juga berkontribusi terhadap kualitas portofolio.

Pencapaian Portofolio

Pada akhir September 2008, Multi Donor Fund memiliki 18 proyek pada lima sektor yang tengah diimplementasikan secara penuh atau telah selesai, dan empat proyek lainnya diharapkan akan mulai dalam waktu dekat.

Kinerja Multi Donor Fund untuk bidang pemulihan masyarakat sangat memuaskan.

Sektor ini adalah prioritas awal Multi Donor Fund, dan 43% dari dana telah dialokasikan untuk proyek pemulihan masyarakat. Pendekatan berbasis masyarakat telah memberdayakan masyarakat untuk mengambil tanggung jawab lebih besar, dan hal ini diharapkan untuk diperluas ke kegiatan rekonstruksi lainnya sekaligus kegiatan mendatang yang akan dilaksanakan di dalam masyarakat setelah operasi MDF berakhir. Model ini telah sukses diadopsi sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan lebih dari 200,000 rumah sebagai tanggapan pasca bencana di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

MDF juga memiliki komitmen kuat untuk mengisi kesenjangan dalam memulihkan infrastruktur penting yang hancur atau rusak karena gempa bumi dan tsunami.

Tigapuluh empat persen portofolio MDF dialokasikan untuk proyek infrastruktur besar. Komitmen MDF tidak hanya terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam memastikan kualitas dari proyek-proyek infrastruktur dengan mendukung kegiatan perencanaan

strategis, rancangan proyek, pelaksanaan dan supervisi, dan meningkatkan kapasitas pemerintah lokal untuk mengoperasikan dan memelihara aset-aset di masa mendatang setelah masa tugas BRR berakhir. Dengan demikian upaya penguatan lembaga dan tata kelola dalam portofolio MDF secara langsung berkaitan dengan sektor infrastruktur yang meningkatkan kesinambungan investasi.

Mendukung tata kelola yang baik untuk menjamin kualitas rekonstruksi dan penyediaan layanan masyarakat merupakan fokus penting. Multi Donor Fund telah mengalokasikan US \$ 62 juta untuk mendukung penguatan tata kelola. Dukungan disediakan untuk memperkuat kelembagaan pemerintah lokal dalam berbagai sektor untuk menjamin transisi yang lancar untuk melaksanakan proyek-proyek rekonstruksi yang tengah berlangsung dan penyerahan aset-aset dari BRR ke badan pemerintah yang relevan. Proses partisipatif dan akuntabilitas dipromosikan dalam proyek-proyek MDF terutama dalam sektor Pemulihan Masyarakat. Proyek Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil mendorong keikutsertaan masyarakat sipil yang lebih luas, termasuk perempuan, dalam proses tata kelola.

Mempromosikan lingkungan hidup yang berkesinambungan selama dan setelah proses rekonstruksi adalah prioritas yang tinggi dalam Multi Donor Fund. Proyek-proyek MDF dalam sektor ini berfokus dalam memperkuat kapasitas, mempromosikan kesadaran lingkungan hidup dan mendukung kebijakan untuk meningkatkan praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Melalui sektor ini, kesempatan untuk memperoleh mata pencaharian yang ramah lingkungan diciptakan dan wilayah pertanian yang terkena dampak tsunami dibersihkan sehingga dapat menjadi lahan produktif kembali. Dukungan dan komitmen yang kuat dari masyarakat penerima manfaat memberi kontribusi besar terhadap kesuksesan dari proyek di sektor ini. Melalui sektor lingkungan hidup, MDF tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap proses rekonstruksi tetapi juga dalam pengembangan ekonomi jangka panjang wilayah ini.

Sektor perkembangan ekonomi akan memperoleh peningkatan perhatian pada tahun-tahun berikutnya. US \$ 50 juta telah dialokasikan untuk mendorong perkembangan ekonomi di 2008, dengan harapan akan terdapat investasi lanjutan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, ekonomi Aceh telah didorong oleh kegiatan rekonstruksi seperti transportasi dan konstruksi. Dengan berakhirnya rekonstruksi, sektor ini kian menurun. Investasi di sektor lain seperti pertanian dan manufaktur lebih diperlukan

untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan mata pencaharian yang berkelanjutan sehingga masyarakat Aceh dan Nias dapat meneruskan manfaat dari rekonstruksi di masa mendatang. Maka dari itu dukungan yang signifikan dari MDF dalam bidang ini akan memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Proyek MDF membangun sinergi melalui pendekatan bersama dan tema lintas sektor. Banyak dari proyek-proyek MDF berisikan sub-komponen yang saling mengisi dan menjawab tujuan dan obyektif di sektor lainnya. Sebagai contoh dua proyek pada sektor lingkungan hidup dalam portofolio, Pengelolaan Limbah Tsunami dan Proyek Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Aceh, masing-masing mempunyai komponen kuat yang berfokus pada penguatan kapasitas tata kelola dan mengembangkan mata pencaharian. Sifat lintas sektor dari proyek-proyek ini telah menghasilkan sebuah pendekatan yang lebih holistik dari proses rekonstruksi, dan meningkatkan pengaruh pada portofolio MDF secara keseluruhan.

Informasi Keuangan Terkini

Multi Donor Fund sampai kini telah menerima pernyataan kontribusi sebesar US \$ 692 juta dari 15 donor berbeda. Termasuk dalam jumlah ini adalah US\$ 16 juta tambahan penyertaan dana dari Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Kanada dalam periode pelaporan kali ini. MDF telah menerima US\$ 472 juta dari total komitmen dari donor.

Sampai dengan September 30, 2008, Multi Donor Fund telah mengalokasikan US \$ 515 juta kepada 18 proyek¹. Selama tahun terakhir, Komite Pengarah memberikan komitmen tambahan sebesar US\$ 99 juta untuk pendanaan lima proposal proyek baru, dan US \$ 14 juta lainnya untuk dana tambahan untuk empat proyek yang tengah berlangsung².

BRR telah memberikan komitmen untuk berkontribusi sebanyak US \$ 236 juta dalam pembiayaan bersama untuk empat proyek dalam portofolio MDF. Sejumlah US \$ 334 juta (65% dari dana yang dialokasikan) telah dicairkan untuk 18 proyek yang dilaksanakan oleh MDF³.

1. "Dana yang Dialokasikan" merujuk pada dana yang dialokasikan kepada proyek melalui perjanjian hukum yang ditanda tangani
2. "Dana yang sudah dikomitmekan" merujuk pada dana yang sudah disetujui sebagai konsep proyek oleh Komite Pengarah.
3. "Dana yang sudah Dicairkan" merujuk pada dana yang sudah dikirimkan dari MDF ke rekening proyek.

US \$ 57 juta masih belum dialokasikan dalam anggaran Multi Donor Fund sampai dengan 30 September 2008.

Walaupun tanggal masa kerja MDF telah diperpanjang sampai akhir 2012, pengalokasi dana tersisa ini sangat penting dilakukan dengan cepat untuk memastikan proyek dapat dirancang dan dilaksanakan dalam kerangka waktu ini.

Melihat Kedepan: Menanggapi Perubahan Kebutuhan

Selama setahun kedepan, proyek yang tengah berlangsung diharapkan untuk mencapai sasaran masing-masing. Alokasi tepat waktu dari sisa dana MDF sangat penting untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan pada saat masa masa kerja MDF berakhir pada 2012. Keterbatasan waktu ini memberikan tantangan yang signifikan terhadap semua proyek MDF, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa mekanisme, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan tersedia untuk menjamin kesinambungan investasi yang dilakukan di Aceh dan Nias.

Penggunaan sisa dana berfokus pada infrastruktur, penguatan kelembagaan dan pengembangan ekonomi.

Hal ini juga harus berfokus terhadap pengembangan kapasitas yang mendukung dan memperkuat kelembagaan yang terintegrasi secara lintas sektor. Sisa dana Multi Donor Fund akan bermanfaat untuk mengangkat program

dan pendanaan bersama dari pemerintah daerah di sektor prioritas yang disepakati. Melalui pendekatan ini, MDF akan berkontribusi dalam pengembangan kapasitas Pemerintah Aceh dan Nias untuk mengelola aset-aset dari investasi rekonstruksi yang dilakukan dan memperkuat kemampuan mereka untuk menggunakan sumber daya mereka secara efektif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebuah Komitmen untuk Meningkatkan Kualitas dan Kinerja

Multi Donor Fund menilai kinerja dan pencapaian untuk kepentingan ke depan. Tinjauan terhadap kesinambungan lingkungan dan sosial telah dilakukan pada tahun 2008, dan evaluasi eksternal pertengahan masa kerja (mid-term) oleh pihak independen telah ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja portofolio dan operasional MDF. Tinjauan ini akan memberikan kepada MDF sebuah pandangan menyeluruh mengenai pencapaian MDF dalam proses rekonstruksi dan akan memberikan rekomendasi untuk sisa masa kerja MDF. Pelajaran yang diambil dari pengalaman Multi Donor Fund tidak hanya untuk meningkatkan operasional portofolio MDF tetapi secara luas akan dibagikan sehingga rekomendasi-rekomendasi yang berpandangan ke depan tersebut dapat meningkatkan kualitas dari upaya rekonstruksi paska bencana dalam konteks yang lain.



PERTEMUAN KOMITE PENGARAH Multi Donor Fund pada bulan September 2008 menghadirkan tamu penting, yaitu Gubernur Sumatera Utara (tiga dari kiri).
(Foto: Carolina Usmany)

Perempuan Pekerja Keras

Program Pengembangan Kecamatan juga melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan, tidak hanya pada saat rapat namun juga dalam kegiatan proses pembangunan, seperti terlihat digambar, perempuan mengangkat batu untuk pembangunan irigasi di kabupaten Aceh Utara.

(Foto: Siti Rahmah)





LATIHAN INSTALASI STUDIO RADIO KOMUNITAS DI GUNUNG SITOLI, NIAS

Tim ARRNet memberikan pelatihan pengelolaan radio komunitas di Gunung Sitoli, Nias untuk alih pengetahuan yang berkaitan dengan teknis instalasi studio. (Foto: Khoerudin Wahyu M. - Staff of ARRNet, Faskab Aceh Besar)

BAB 1 MEMPERLUAS OPERASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Sebagai tanggapan terhadap permintaan Pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi setelah bencana tsunami dan gempa bumi di Aceh and Nias, beberapa mitra donor membentuk sebuah dana perwalian multi donor untuk mendukung program rekonstruksi dan rehabilitasi. Dana perwalian ini telah mengumpulkan AS\$ 692 juta dari 15 donor yang berbeda: Komisi Eropa, Belanda, Kerajaan Inggris, Bank Dunia, Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Kanada, Bank Pembangunan Asia, Amerika Serikat, Belgia, Finlandia, Selandia Baru dan Irlandia. Bank Dunia bertindak sebagai wali dari pendanaan ini. Multi Donor Fund diatur oleh sebuah Komite Pengarah yang terdiri dari perwakilan Pemerintah, Donor, LSM dan Organisasi Masyarakat Madani. Panitia Pengarah bertemu secara rutin di Jakarta atau Aceh untuk mengulas dan menyetujui proposal dan mendiskusikan kemajuan proses pemulihan di Aceh dan Nias.

Berfokus pada Tujuan Operasional dari Multi Donor Fund

Tujuan keseluruhan dari Multi Donor Fund adalah untuk mendukung Rencana Induk Pemerintah Indonesia secara efisien dan efektif¹. MDF mendukung Rencana Induk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah Aceh dan Nias, menggunakan sebuah kerangka kerja yang komprehensif dan menyeluruh untuk memulihkan layanan masyarakat dan membangun kembali masyarakat Aceh

dan Nias yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak bencana. MDF didukung oleh mitra pemerintah, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR) yang mengkoordinasi upaya rekonstruksi di Aceh dan Nias.

Proses persetujuan MDF menjamin bahwa portofolionya sesuai dengan prioritas rekonstruksi.

Multi Donor Fund menerima proposal proyek yang disetujui oleh BRR untuk pendanaan. Komite Pengarah meninjau dan menyetujui proposal dengan bantuan Komite Teknis, yang beranggotakan perwakilan dari Pemerintah, para Donor, Bank Dunia dan PBB sebagai pengamat. Bank Dunia dan beberapa badan lainnya adalah Badan Mitra², yang bertanggungjawab untuk menilai dan menyelia proyek, termasuk memberikan dana hibah kepada badan pelaksana pemerintah dan non pemerintah. Sebagian besar dana MDF (75%) disalurkan melalui anggaran pemerintah dan dilaksanakan oleh badan nasional.

1. Rencana Induk dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Wilayah dan Penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Propinsi Sumatera Utara. Pemerintah Indonesia, April 2005.
2. Badan Mitra yang disetujui oleh Multi Donor Fund adalah UNDP, World Food Program (WFP) dan Bank Dunia.

Kebijakan Bantuan Pemulihan (Recovery Assistance Policy – RAP) dari Multi Donor Fund berfungsi sebagai kerangka kerja untuk operasional MDF. Hal ini menentukan prioritas sektor dan pendekatan untuk pendanaan, dan juga menjabarkan berbagai pendekatan untuk pencapaian kualitas dan keterkaitan yang harus dipertimbangkan dalam proyek MDF. Beberapa tema yang berkaitan termasuk keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial, dengan fokus pada jender. Keterkaitan lainnya adalah sensitivitas terhadap konflik, kesetaraan regional dan pengentasan kemiskinan. MDF tengah melakukan tinjauan untuk menilai kinerja portofolio pada masalah keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial.

Multi Donor Fund telah terbukti sebagai kerangka kerja yang kuat dalam mencapai tujuan dari Deklarasi Paris tentang Efektifitas Bantuan dalam konteks pemulihan. Hal ini juga berfungsi sebagai landasan untuk dialog wacana yang lebih luas dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses rekonstruksi³. Portofolio Multi Donor Fund menerapkan lima Komitmen Kemitraan Deklarasi Paris tentang Efektifitas Bantuan. Hal ini meliputi rasa kepemilikan, keselarasan, harmonisasi, hasil dan akuntabilitas bersama⁴.

Pada 2008, tahun keempat setelah tsunami, prioritas beralih dari rekonstruksi darurat menuju pada keberlangsungan investasi rekonstruksi dan mendorong pengembangan ekonomi. Investasi besar telah ditanamkan di Aceh dan Nias selama upaya rekonstruksi yang berlangsung. Untuk memastikan bahwa penerapan pemeliharaan dan prosedur operasional tersedia merupakan upaya penting dalam menjaga keberlangsungan investasi, maka dari itu proyek-proyek diarahkan untuk memfokuskan pada keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi BRR bahwa dana yang masih tersedia diprogramkan untuk proyek-proyek yang menekankan pembangunan kapasitas. Untuk menjamin keberlanjutan, selama 2008 MDF telah memprioritaskan upaya pada dua bidang: (1) mendukung transisi dari BRR ke pemerintah-pemerintah lokal, dan (2) meningkatkan pengembangan ekonomi jangka panjang di Aceh dan Nias.

Sekretariat Multi Donor Fund menjamin kualitas, koordinasi dan melaporkan kinerja portofolio. Peran Sekretariat meliputi koordinasi dan komunikasi yang efektif sekaligus juga menjamin kualitas dan mengikuti Rencana Induk Pemerintah untuk memilih proposal yang diajukan untuk pendanaan MDF. Sekretariat memonitor dan melaporkan kegiatan proyek dan mengatur pertemuan Tinjauan Teknis dan Komite Pengarah untuk menyetujui proposal untuk pendanaan MDF dan mengevaluasi hasilnya. Pada tahun 2008 sebanyak tujuh belas pertemuan Tinjauan Teknis dan tiga pertemuan Komite Pengarah terjadi untuk menyetujui lima proyek baru senilai AS\$ 99 juta dan

kelanjutan dari empat proyek yang tengah dilaksanakan dengan nilai total AS\$ 14 juta. Diskusi yang berlanjut dengan Organisasi Masyarakat Madani juga memberikan masukan tentang keperluan masyarakat dan bagaimana proyek dapat dilaksanakan dengan efektif.

Penutupan BRR pada 2009 mempengaruhi operasi dari Multi Donor Fund pada berbagai tingkat. Sekretariat MDF telah terlibat dalam serangkaian diskusi dengan pemangku kepentingan tentang pengaruh masa akhirnya BRR. Hal ini meliputi pengaturan pengelolaan berkaitan dengan perwakilan pada tingkat Ketua Bersama dan Komite Pengarah, dan pengaturan implementasi proyek-proyek yang akan berlanjut setelah BRR mengakhiri masa tugasnya. Enam proyek pada portofolio Multi Donor Fund yang melibatkan BRR dalam pelaksanaan atau implementasi akan diteruskan setelah masa tugas BRR. MDF mendukung transisi dengan menyediakan dukungan baik kepada BRR maupun pemerintah lokal dalam mempersiapkan pengalihan aset hasil rekonstruksi dan proyek-proyek kepada badan-badan terkait.

Multi Donor Fund telah diperpanjang untuk menjamin kelanjutan implementasi dalam memenuhi kebutuhan penting rekonstruksi. Penutupan MDF telah diperpanjang dari Desember 2010 ke Desember 2012. Perpanjangan ini juga akan menjamin bahwa pemulihan akan berlanjut secara kelembagaan, finansial dan sosial, dan akan memberikan kesempatan pada MDF untuk memperkuat lembaga-lembaga sehingga memungkinkan proses pengalihan yang mulus. Multi Donor Fund telah siap untuk terus memainkan berbagai peran penting dalam pemulihan Aceh dan Nias.

Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif Multi Donor Fund memainkan peran koordinasi dengan pihak-pihak penting pada berbagai tingkat. Hal ini termasuk berpartisipasi dalam forum-forum dan acara khusus, seperti evaluasi program, pertemuan pemangku kepentingan, pameran dan dialog wacana yang dilakukan oleh BRR, para donor dan badan multilateral lainnya. Selama setahun terakhir, MDF telah berpartisipasi dalam sebuah pameran yang dilakukan oleh Bappenas dan BRR saat Tinjauan Tengah Waktu Kerja Rekonstruksi di Aceh dan Nias. MDF turut berpartisipasi dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan Kepulauan Nias ke empat. Disamping itu, MDF juga diminta untuk melakukan paparan tentang kegiatan MDF kepada parlemen Komisi Eropa di Belgia. Kegiatan komunikasi seperti ini memberikan visibilitas untuk MDF dan proyek-proyeknya.

3. Tinjauan Multi Donor Fund Setelah Krisis. Laporan Akhir dipersiapkan oleh Scanteam, Februari 2007. Tahun Pertama Membangun Bersama: Hasil, Tantangan dan Kesempatan. Laporan Hasil Pelajaran yang Didapat, Mei 2006.

4. Deklarasi Paris tentang Efektifitas Bantuan. Kepemilikan, Harmonisasi, Keselarasan, Hasil dan Akuntabilitas Bersama, Februari – Maret 2005.

Multi Donor Fund memfasilitasi kesempatan untuk pemerintah propinsi dan BRR untuk menjabarkan sektor-sektor prioritas untuk pemrograman dana yang tersedia kepada para Donor dan pemangku kepentingan lainnya. Pemaparan rekomendasi tersebut sesuai dengan revisi Rencana Induk Pemerintah untuk rekonstruksi Aceh dan Nias. Sektor yang dikedepankan untuk pendanaan tambahan adalah infrastruktur dan pengembangan ekonomi, dengan penekanan kuat pada kegiatan pembangunan kapasitas.

Multi Donor Fund mempromosikan keterlibatan banyak pihak dalam proses rekonstruksi. Pada sebuah dialog wacana di 2008 yang berjudul "Peran Organisasi Masyarakat Madani Selama Periode Transisi dan Selanjutnya" bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana Organisasi Masyarakat Madani dapat berpartisipasi dalam pengalihan aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi secara benar kepada otoritas, organisasi atau perorangan. Diskusi ini juga menekankan pada masalah umum keberlangsungan jangka panjang proses dan hasil pembangunan. Banyak proyek Multi Donor Fund juga telah membuat Komite Pengarah yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses rekonstruksi.

Komunikasi tentang kegiatan Multi Donor Fund meningkatkan kesadaran akan kebutuhan dan upaya rekonstruksi. Menjangkau kepada para penerima manfaat terjadi melalui pendekatan media yang terintegrasi dengan

menggunakan surat kabar dan radio, sekaligus juga berpartisipasi dalam acara-acara masyarakat (lihat box 1: *Dialog dengan Penerima Manfaat: Sehari di Takengon, Aceh Tengah*). Pendekatan media terintegrasi ini dilakukan di berbagai desa di Aceh dan Nias. Selama setahun terakhir, Sekretariat MDF mengunjungi 11 desa di Aceh dan Nias. Sekretariat MDF juga mengorganisir kunjungan lapangan untuk para donor dan delegasi lain yang berkunjung untuk memfasilitasi hubungan langsung dengan para penerima manfaat dan upaya rekonstruksi. Kunjungan lapangan juga termasuk kesempatan untuk mengikuti misi supervisi untuk proyek-proyek yang diawasi oleh Bank Dunia.

Mengelola Umpan Balik Berkontribusi pada Kualitas Portofolio. Pertanyaan dikelola secara langsung oleh Sekretariat MDF atau diteruskan kepada proyek masing-masing untuk tanggapan. Semua proyek dalam portofolio Multi Donor Fund diminta membentuk Rencana Aksi Anti Korupsi (Anti Corruption Action Plan-ACAP) dalam pengelolaan proyek. Salah satu dari kegiatan yang mendukung ACAP adalah Unit Penanganan Keluhan (Complaint Handling Unit-CHU). Keluhan yang dimasukkan biasanya merupakan pertanyaan umum, penyalahgunaan dana, pendekatan dan metode dalam menyelesaikan kasus, dan penerapan masalah kepatuhan. Selama periode pelaporan 2008, MDF menerima 270 pertanyaan, dimana 70 persen merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan proyek MDF atau organisasi lain, seperti BRR.

Dialog dengan Penerima Manfaat: Sehari di Takengon, Aceh Tengah



MDF Outreach Officer berdialog dengan para wakil masyarakat di Kecamatan Bintang, Takengon, Aceh Tengah

Paling tidak sebulan sekali, Sekretariat MDF mengunjungi masyarakat penerima manfaat, dengan kegiatan antara lain perbincangan dengan penerima manfaat, dialog masyarakat, siaran radio atau pertemuan dengan Bupati atau Camat setempat.

Pada Januari 2008, Sekretariat MDF mengunjungi Takengon di Aceh Tengah, sebuah masyarakat yang lebih terkena dampak gempa bumi daripada oleh tsunami itu sendiri. Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) memasukkan Takengon sebagai bagian dari upaya rekonstruksi berbasis masyarakat untuk membantu membangun kembali infrastruktur masyarakat. Program ini diikuti oleh Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), sebuah program yang menghubungkan partisipasi proses perencanaan kecamatan dari PPK kepada pengambilan keputusan pemerintah kabupaten dan memberikan hibah blok untuk meningkatkan layanan masyarakat dan pemulihan dari infrastruktur ekonomi.

Dalam kunjungan ke Takengon salah satu acaranya adalah perbincangan satu jam di stasiun radio lokal terbesar. Fasilitator PPK dan P2DTK memberikan informasi, menjawab pertanyaan dan memberikan komentar atas kemajuan program. Pertanyaan datang melalui panggilan telepon dan pesan teks, dan kebanyakan terkait tentang bagaimana dana disalurkan kepada

masyarakat, proses akuntabilitas, proses seleksi desa dan bagaimana menghindari tumpang tindih program.

Tim MDF juga mengunjungi Bintang, sebuah desa pada ujung utara Danau Takengon. Pada saat tim menuju ke desa tersebut, mereka mendapati bahwa memancing ikan merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat, namun lebih menariknya, restoran tepi danau banyak ditutup. "Restoran hanya beroperasi di akhir minggu," kata seorang nelayan lokal. "Pekerjaan harian kami adalah mengurus perkebunan kami – karet, kopi dan kakao". Hanya beberapa nelayan bisa dilihat di danau, berusaha menangkap "depik", semacam ikan setempat yang populer.

Di Bintang, fasilitator PPK dan P2DTK bekerja untuk mensosialisasikan sebuah proyek kepada Masyarakat, disebut PNPMP -Program Nasional Pengembangan Masyarakat, yang merupakan versi perluasan dan terintegrasi dari dua program yang ada. Selama sesi ini, sekretariat MDF menerima masukan tentang dampak PPK dan P2DTK terhadap masyarakat dan bidang apa saja yang membutuhkan bantuan lebih lanjut.



(Foto : Nia S.)

Sebuah pertemuan dengan pemerintah setempat mengakhiri kunjungan lapangan tersebut. Para pejabat mengucapkan terima kasih pada MDF atas bantuan mereka kepada masyarakat dan mengutarakan keinginan mereka bahwa lebih banyak hibah dapat disediakan untuk membantu desa-desa terpencil.

Memantau pohon raksasa

Seorang staf pemantauan hutan dari Yayasan Leuser Internasional (YLI) memeriksa sebuah pohon hutan hujan tropis raksasa yang tumbuh dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. YLI melaksanakan pemantauan terhadap hutan Leuser melalui MDF-AFEP untuk memastikan perlindungan berkelanjutan bagi hutan Aceh.

(Foto: Chi Rini - Press Officer, Leuser Internasional Fundation)





**PRODUKSI ILM RADIO KOMUNITAS
DI KRUENG RAYA. DARI, OLEH DAN
UNTUK WARGA**

Hendri seorang pegiat Radio Komunitas Krueng Raya FM sedang melakukan pengambilan suara untuk produksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Meunasah Desa Lamreh. Skenario dan Produser: Hendri, Pengisi Suara: Delfi dan Lia. Pendamping produksi: ARRNet. Hasil produksi ILM diikuti pada sebuah lomba yang disponsori oleh ChildFund Int pada bulan Desember 2007 dan meraih juara ke-2- (Foto: Khoerudin Wahyu M. - Staff of ARRNet, Faskab Aceh Besar)

**BAB
2**

PENCAPAIAN PORTOFOLIO

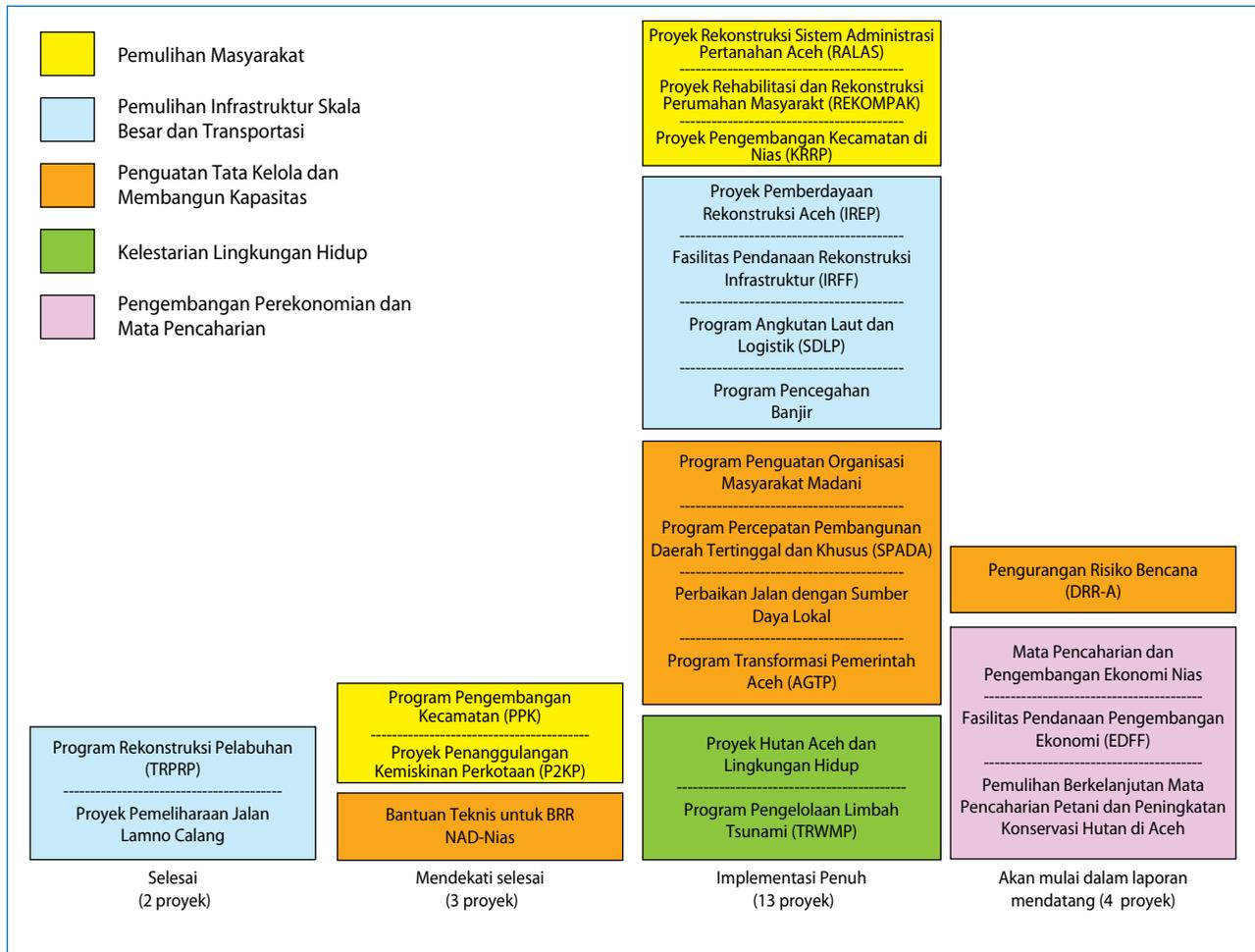
Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias berkontribusi dalam kegiatan rekonstruksi pada lima sektor utama sesuai dengan Rencana Induk Pemerintah Indonesia dan Kebijakan Bantuan Pemulihan MDF sendiri. Proyek-proyek portofolio MDF mencakup daerah sektoral Pemulihan Masyarakat, Infrastruktur, Tata Kelola, Keberlanjutan Lingkungan dan Pengembangan Perekonomian. Pada awalnya MDF memfokuskan pada pemulihan masyarakat, terutama perumahan dan infrastruktur masyarakat. Dalam tahap berikutnya guna memudahkan pemulihan akses, proyek infrastruktur yang lebih besar dimulai dengan rekonstruksi pelabuhan dan jalan, sistem perairan dan sistem pengendalian banjir. Proyek-proyek lingkungan hidup dan pemberdayaan tata kelola juga dilaksanakan dengan tujuan menjamin keberlanjutan investasi MDF secara jangka panjang. Meskipun dukungan terhadap mata pencaharian merupakan salah satu komponen dalam sejumlah besar proyek pada awal bekerjanya MDF, fokus telah bergeser dalam tahun terakhir ini untuk mencaup suatu strategi yang lebih terarah untuk mendukung pengembangan perekonomian sementara lonjakan pembangunan akibat rekonstruksi mulai menurun.

Pada akhir periode pelaporan ini, portofolio Multi Donor Fund terdiri atas 18 proyek, dengan tambahan empat proyek baru yang diharapkan dimulai tahun depan. Proyek-proyek Multi Donor Fund dapat diklasifikasikan

sebagai (i) proyek yang matang atau hampir selesai yang telah memenuhi sebagian besar sasaran, (ii) proyek-proyek dalam tahap pelaksanaan penuh atau sedang berjalan dan membuahkan hasil; (iii) proyek-proyek dalam tahap permulaan, diharapkan membuahkan hasil dalam enam bulan mendatang. Gambar 2.1 menggambarkan status pelaksanaan portofolio MDF, menunjukkan dua proyek telah selesai, tiga proyek hampir selesai dan tiga belas proyek dalam pelaksanaan lengkap. Bab ini melaporkan hasil per 30 September 2008.



Irigasi yang dibangun masyarakat (Foto: Lilis - World Bank Consultant)



Pemulihan Masyarakat

Kinerja Multi Donor Fund dalam mendukung pemulihan masyarakat sangat memuaskan di dalam laporan triode sebelumnya. Sebagian besar proyek-proyek bidang ini sedang dalam implementasi penuh atau hampir mendekati penyelesaian. Diperkirakan 168.000 jiwa telah hilang dan sekitar 300.000 rumah rusak atau hancur oleh tsunami dan gempa bumi di Aceh dan Nias. Pada tahun 2006, survei dari Program Pengembangan Kecamatan menunjukkan bahwa lebih dari 50% infrastruktur di 5.869 desa yang terkena dampak hancur atau rusak, dan diperkirakan sekitar AS\$ 752 juta diperlukan untuk memperbaiki

infrastruktur desa dan produktivitas masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Prioritas awal Multi Donor Fund adalah fokus kepada pemulihan masyarakat dan hampir seluruh sasaran terpenuhi. Hal ini termasuk bantuan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan infrastruktur masyarakat di Aceh dan Nias. Lebih dari AS\$ 222 juta (43% dari alokasi dana) telah disisihkan untuk rekonstruksi berbasis masyarakat, dengan komitmen tambahan dari pemerintah sebesar AS\$ 31 juta.

Dukungan terhadap rekonstruksi perumahan merupakan komponen yang sangat penting dalam pemulihan masyarakat, dan sebagian besar sasaran telah tercapai.

Pendekatan berbasis masyarakat telah terbukti merupakan cara yang efisien tidak hanya untuk membangun kembali perumahan namun juga untuk menciptakan rasa turut memiliki dan kebanggaan antara penerima manfaat. Sejumlah 6.554 unit rumah (81% dari sasaran) telah dibangun melalui proyek perumahan masyarakat di Aceh, yang mengisi kesenjangan perumahan di 130 komunitas. Lebih dari 2.000 unit rumah telah diselesaikan di Aceh sepanjang tahun lalu – jumlah terbesar dalam pembangunan selama satu tahun sejak dimulainya proses rekonstruksi. Lebih dari 3.400 unit rumah sedang dalam tahap pembangunan di Aceh dan Nias. Sembilan puluh delapan persen dari unit rumah yang ditargetkan untuk rehabilitasi (6.900 unit rumah di Aceh) telah terselesaikan, dengan 100% tingkat hunian. Tingkat hunian untuk unit rumah baru yang dibangun saat ini adalah 86%, dengan perkiraan ada peningkatan yang signifikan setelah semua fasilitas terselesaikan.

Multi Donor Fund telah mencapai sebagian besar sasaran dalam rekonstruksi infrastruktur vital masyarakat.

Melalui program-program Pengembangan Kecamatan dan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, masyarakat menerima hibah untuk membangun infrastruktur di lebih dari 2.900 desa di Aceh dan Nias. Ini mencakup konstruksi atau rehabilitasi 275 gedung sekolah, lebih dari 2.500 km jalan, 19 pos kesehatan, 1.380 sistem pasokan air bersih dan 118 sistem penyimpanan air. Kedua program ini telah mencapai sebagian besar target dan bersama-sama telah membangun 159 balai desa dan 20 pasar desa, serta memberikan hasil yang signifikan dalam perbaikan dan konstruksi jembatan, irigasi dan sistem drainase.

Pengembangan sistem dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan yang tinggi untuk verifikasi dan pencatatan atas hak tanah.

Proyek ini telah memperkenalkan sebuah sistem komputerisasi pencatatan data tanah dan memainkan peran utama dalam pencegahan pencaplokan tanah dan spekulasi. Meskipun proyek ini tidak mampu mencapai seluruh sasaran, tingkat kepuasan penerima manfaat dari penerima sertifikat cukup tinggi. Sejumlah 112.460 hak milik tanah telah didistribusikan hingga kini, dan 126.107 hak tanah telah dicatat. Survei telah diselesaikan terhadap 211.829 bidang tanah.



FASILITATOR DAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA MSJ GIGIENG SEDANG MEMERIKSA BERITA ACARA

Fasilitator MDF Rekompak selalu mengajarkan kepada masyarakat agar seluruh kegiatan pembangunan di desa benar benar transparan. Fasilitator selalu mengajarkan masyarakat untuk selalu membuat secara tertulis hasil keputusan rapat berupa berita acara yang nantinya ditempel di papan informasi untuk bisa diketahui oleh semua kalangan masyarakat.

(Foto: Ahmadra Penta Wardana Putra)

Pendekatan berbasis masyarakat berdampak lebih luas terhadap penerima manfaat. Lebih dari 13.5 juta hari kerja telah dihasilkan melalui proyek-proyek yang rekonstruksi kemasyarakatan. Lebih penting lagi, semangat pendekatan berbasis masyarakat telah menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi antara para penerima manfaat. Hal ini telah mengarahkan pada percepatan rekonstruksi pada saat dana diterima oleh penerima manfaat serta menghasilkan rasa kepemilikan yang kuat.

Pemberdayaan perempuan terjadi melalui pendekatan berbasis masyarakat dalam rekonstruksi. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) serta proyek Rehabilitasi & Rekonstruksi Perumahan Masyarakat (REKOMPAK) telah menekankan pentingnya untuk mengikutsertakan perempuan dalam proses rekonstruksi. Dengan memungkinkan perolehan pendidikan melalui pemberian beasiswa, PPK selanjutnya mengembangkan keterampilan para anggota masyarakat, khususnya perempuan, untuk masa yang akan datang.

Proyek	Alokasi dana dalam AS\$ juta
Proyek Rahabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat (REKOMPAK)	85,00
Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	64,70
Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	17,96
Proyek Pengembangan Kecamatan di Nias (KRRP)	25,75
Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (RALAS)	28,50
Jumlah	221,91

Pemulihan Infrastruktur Skala Besar dan Transportasi

Kemajuan paling signifikan dalam portofolio Multi Donor Fund pada tahun terakhir ini adalah dalam rekonstruksi infrastruktur inti. Menyusul kegiatan persiapan yang diperlukan untuk proyek infrastruktur, sebagian besar dari proyek-proyek telah memulai proses konstruksi pada tahun laporan ini.

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi yang ekstensif dalam sektor infrastruktur. Mengidentifikasi penyediaan akses ke daerah-daerah yang terkena bencana agar kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi dapat segera dimulai merupakan kebutuhan yang vital pada awal rekonstruksi. Tujuan untuk "Membangun Kembali Dengan Lebih Baik" ("Building Back Better") memiliki pengertian yang sama dalam upaya rekonstruksi, terutama yang berhubungan dengan infrastruktur. Multi Donor Fund telah menginvestasikan sejumlah AS\$176 juta (34% dari alokasi dana) dalam proyek-proyek pemulihan infrastruktur dan transportasi berskala besar, di mana Pemerintah Indonesia turut serta secara signifikan dalam pembiayaan.

Menyediakan akses ke daerah-daerah yang terkena bencana segera setelah tsunami dan gempa bumi merupakan peran penting yang dipenuhi oleh Multi Donor Fund. Wujud tanggap darurat MDF dikonsentrasikan pada penyediaan akses agar material rekonstruksi dapat mencapai daerah-daerah terkena bencana melalui pendanaan proyek Angkutan Laut & Logistik, Rekonstruksi Pelabuhan serta Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang. Proyek Rekonstruksi Pelabuhan memfokuskan pada keberlangsungan fungsi pelabuhan yang rusak berat agar dapat menerima pengiriman dan penyimpanan kargo. Ini **Program-program yang Saling Terkait dan Mendukung**



LAMNO-CALANG ROAD
Pemadatan jalan merupakan langkah antisipatif sebelum musim hujan
(Foto: UNDP)

didukung oleh rekonstruksi kargo di daerah-daerah terpencil yang pada awalnya tidak dapat diakses melalui jalan darat. Sedangkan proyek Rekonstruksi Pelabuhan dan Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang telah diselesaikan pada akhir tahun 2007. Program Angkutan Laut & Logistik telah berhenti menyediakan jasa pengapalan sejak Januari 2007, namun sekarang mengutamakan pada pemberian pelatihan kepada otorita pelabuhan untuk memastikan adanya pengelolaan yang berkelanjutan terhadap pelabuhan yang baru dibangun berikut peralatannya.

Kemajuan yang paling patut dicatat dalam upaya rekonstruksi beberapa tahun ini adalah dalam sektor infrastruktur. Sebesar AS\$227 juta, termasuk pembiayaan bersama oleh BRR, telah diberikan kepada 57 sub-proyek melalui Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF). Proyek-proyek senilai AS\$7,8 juta telah diselesaikan, dan proyek-proyek senilai AS\$210 juta masih dalam konstruksi dan satu proyek (AS\$9,2 juta) sedang berada pada tahap pelelangan. Investasi ini akan memberikan jalan, pelabuhan dan sistem perairan yang vital untuk menunjang pemulihan ekonomi dan masyarakat di seluruh Aceh dan Nias. Dukungan terhadap Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) telah membantu dalam menjamin kualitas investasi infrastruktur. Para tim IREP telah membantu mempersiapkan 63 paket investasi untuk membangun 748 km jalan, 16 sistem perairan dan lima pelabuhan di Sinabang, Calang, Gunung Sitoli, Lhokseumawe, dan Malahayati.

Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh melindungi investasi rekonstruksi dan melakukan mitigasi terhadap kerusakan di masa mendatang di daerah-daerah yang rawan terhadap banjir. Proyek ini melindungi daerah pusat bisnis di Banda Aceh melalui konstruksi stasiun-stasiun pompa dan sistem drainase, serta pemasangan katup banjir. Proyek ini telah terbukti merupakan suatu proyek yang penting dalam mengamankan investasi di daerah perkotaan.

Proyek	Alokasi dana dalam AS\$ juta
Program Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh	4,50
Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP)	42,00
Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF)	100,00
Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang	1,46
Program Angkutan Laut dan Logistik (SDLP)	24,70
Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP)	3,78
Jumlah	176,44

Penguatan Tata Kelola

Multi Donor Fund melanjutkan dukungannya bagi berbagai lembaga pemerintah untuk mendukung kelanjutan pembangunan, keberlangsungan rekonstruksi serta penyampaian layanan umum.

Dukungan tata kelola yang baik untuk memastikan kualitas rekonstruksi dan pemberian layanan umum merupakan kunci fokus. Untuk memastikan keberlangsungan investasi rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias maka penting untuk adanya elemen administrasi umum yang kokoh. Multi Donor Fund telah mengalokasikan US\$75 juta untuk mendukung penguatan tata kelola.

Penguatan Lembaga-lembaga pemerintah daerah telah terjadi di berbagai sektor. Proyek-proyek Multi Donor Fund hingga kini telah memberikan pelatihan formal, diikuti dengan pelatihan kerja kepada 2.000 staf lokal untuk meningkatkan kapasitas di bidang-bidang seperti perencanaan dan anggaran, kesehatan, pendidikan, konstruksi infrastruktur, pengelolaan limbah dan drainase, pengelolaan hutan, perencanaan tata kota dan administrasi pertanahan. Selanjutnya diadakan pelatihan informal di lokasi kerja melalui proyek Bantuan Teknis untuk BRR dengan menempatkan ahli teknis di kantor wilayah BRR dan di Proyek Pengelolaan Limbah atau konsultan wilayah BRR yang secara langsung mendukung satuan kerja dalam pekerjaannya. Proyek Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal telah berhasil mengikutsertakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun kapasitasnya dengan metode berbasis sumber daya lokal. Kegiatan pelatihan dalam pengelolaan kontrak, konstruksi jalan dan teknis pengawasan konstruksi diberikan secara terus-menerus kepada insinyur dan pengawas dari pemerintah kabupaten yang berkaitan.



TATA KELOLA
Perempuan memberikan masukan-masukan penting dalam pertemuan-pertemuan warga
(Foto: Nias S)

Dukungan dengan target sedang disediakan untuk memperkuat lembaga-lembaga guna memastikan transisi berjalan lancar dari proyek-proyek rekonstruksi yang sedang berlangsung dan aset-aset BRR kepada badan pemerintah yang berkaitan. Alih pindah pengetahuan berkaitan dengan kegiatan pengembangan kebijakan, desain proyek dan jaminan kualitas merupakan fokus Bantuan Teknis untuk BRR dan Program Transformasi Pemerintah Aceh. Bantuan Teknis (TA) untuk BRR merupakan pemberian dukungan dalam pemindahan semua aset dari BRR ke otorita daerah terkait pada saat BRR berakhir. Ini termasuk pengembangan dan pelaksanaan proses-proses yang relevan dan mekanisme pendanaan untuk mempermudah proses transisi. Program Transformasi Pemerintah Aceh bekerja dengan pemerintah Propinsi membangun kapasitas untuk mengelola aset rekonstruksi setelah pembubaran BRR. Ini akan tercapai dengan cara memperkuat kebijakan dan kapasitas pemerintah untuk secara efektif mengkoordinasikan jumlah besar program transisi dan pembangunan kapasitas berkaitan dengan pemulihan dengan dukungan berbagai pihak pemangku kepentingan.

Proses partisipasi dan akuntabilitas diutamakan dalam proyek-proyek Multi Donor Fund. Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus mendukung perencanaan melalui pendekatan "dari bawah ke atas" melalui hibah yang ditujukan untuk 17 kabupaten di Aceh dan dua kabupaten di Nias. Ini melibatkan pelatihan bagi pegawai pemerintah, anggota masyarakat umum, pegawai universitas dan perwakilan masyarakat. Proyek Penguatan Organisasi Masyarakat Madani mempromosikan partisipasi yang lebih luas untuk masyarakat umum, termasuk perempuan, dalam proses tata kelola. Proyek ini telah mendirikan dua Pusat Sumber Daya, satu di Aceh dan satu lagi di Nias, yang menjadi fasilitas pelatihan penting, dan merupakan

titik fokus untuk dialog antara pemerintah dan masyarakat. Melalui proyek Penguatan Organisasi Masyarakat Madani, perempuan juga telah diperdayakan untuk lebih banyak berpartisipasi dalam masalah-masalah menyangkut pembangunan komunitasnya, dimana 45% dari penerima manfaat hibah untuk pengembangan mata pencaharian adalah perempuan.

Kelestarian Lingkungan Hidup

Program-program lingkungan hidup dalam portofolio Multi Donor Fund memperkenalkan praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan alternatif dalam mata pencaharian.

Keberlanjutan lingkungan dicapai melalui beragam pendekatan. Ini mencakup dukungan terhadap kebijakan dan pendayaan kapasitas untuk pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan kepatuhan terhadap pengamanan lingkungan hidup; serta penciptaan kegiatan alternatif dalam mata pencaharian untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Hutan-hutan pada eko-sistem Leuser dan Ulu Masen di Aceh dan Sumatera Utara merupakan dua daerah perhutanan terbesar keberadaannya di seluruh Asia Tenggara. Hutan-hutan ini sangat penting dalam menjamin persediaan air untuk sekitar 60% penduduk serta juga untuk memelihara salah satu sumber terkaya di wilayah ini yakni bio-diversitas. Proyek Hutan Aceh & Lingkungan Hidup dirancang untuk melindungi sekitar 3,3 juta hektar ekosistem hutan ini dari pembalakan liar. Keberhasilan yang cukup berarti oleh proyek ini telah dicapai dalam menguatkan lembaga-lembaga terkait melalui tata kelola ekosistem hutan di berbagai tingkat.

Proyek	Alokasi dana dalam AS\$ juta
Program Transformasi Pemerintah Aceh	9,92
Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal Pedesaan	11,80
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus	25,00
Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh dan Nias	6,00
Bantuan Teknis untuk BRR NAD – Nias	22,48
Jumlah	75,20



POLHUT ACEH

Para anggota Polisi Kehutanan (polhut) Aceh berdiskusi tentang penanganan kasus kehutanan saat praktek Pelatihan Penyegaran Polisi Kehutanan Aceh yang dilaksanakan Yayasan Leuser Internasional untuk AFEP di Takengon Aceh Tengah 12 Mei 2008. MDF AFEP memberikan dukungan pelatihan teknis terhadap 250 polhut dalam pengamanan hutan Aceh khususnya di Kawasan Ekosistem Leuser.
(Foto: Chik Rini - Press Officer, Leuser Internasional Foundation)

Program Pengelolaan Limbah Tsunami secara khusus sangat berhasil dalam memenuhi sasarannya. Segera sesudah tsunami upaya ini memfokuskan pada pemindahan limbah padat dan membangun tempat pembuangan akhir serta infrastruktur lainnya yang mendukung pembuangan limbah padat tersebut. Proyek pengelolaan limbah ini telah membangun atau meningkatkan layanan 10 tempat pembuangan akhir sementara di delapan kabupaten dan pemindahkan 1,1 juta meter kubik limbah yang diakibatkan oleh tsunami. Dua puluh persen dari seluruh limbah akibat tsunami di Aceh telah dipindahkan melalui proyek Multi Donor Fund ini.

Program Pengelolaan Limbah Tsunami ini memperkenalkan ke Indonesia sebuah model bagi pengelolaan limbah padat daerah. Ini terjadi karena kemitraan kuat yang terjalin antara proyek dan pemerintah daerah, serta kesungguhan komitmen sebagai hasil dari kemitraan ini. Dalam perencanaan tahap berikutnya, proyek ini akan memfokuskan pada konstruksi tempat pembuangan akhir permanen.

Membangun kesadaran akan lingkungan hidup bagi para pemangku kepentingan merupakan fitur kunci dalam proyek-proyek Multi Donor Fund. Proyek Hutan Aceh & Lingkungan Hidup membantu pemerintah dalam mengembangkan rencana strategis dan prakarsa untuk pengembangan hutan di Aceh. Proyek tersebut telah berkontribusi ke prakarsa utama lingkungan hidup seperti reboisasi dan perlindungan hutan melalui kegiatan pemantauan dan pelatihan. Dengan melibatkan masyarakat dalam konstruksi tempat pembuangan akhir, program

Pengelolaan Limbah melembagakan praktek dan memindahkan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan pembangunan tempat pembuangan akhir di masa mendatang. Pada tahap pemulihan upaya semakin meningkat dalam membangun kapasitas setempat dan komitmen untuk menciptakan dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah padat yang berkelanjutan.

Program lingkungan hidup dari MDF bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan mata pencaharian yang peka terhadap lingkungan hidup. Ini termasuk mendaur ulang limbah kayu tsunami melalui proyek-proyek pertukangan kayu, pengumpulan dan penemuan kembali bahan plastik dan bahan daur ulang lainnya, bio-gas dan kompos. Palapa Plastic Recycle, sub proyek daur ulang plastik, merupakan salah satu finalis dalam Global Development Network Award. Satu-satunya peserta dari Indonesia, proyek tersebut merupakan satu dari 120 nominator dari seluruh dunia. Membantu masyarakat untuk kembali ke mata pencaharian berbasis pertanian semakin penting karena pekerjaan dari dampak proses rekonstruksi mulai menurun. Untuk mendukung hal ini, lebih dari 880 ha tanah pertanian dari dampak tsunami telah dikosongkan dan dikembalikan ke penggunaan produktif.

Proyek	Alokasi dana dalam AS\$ juta
Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup (AFEP)	17,53
Program Pengelolaan Limbah Tsunami (TRWMP)	24,41
Jumlah	41,94



MENANAM UNTUK MASA DEPAN

Para anggota Polisi Kehutanan (polhut) Aceh berdiskusi tentang penanganan kasus kehutanan saat praktek Pelatihan Penyebaran Polisi Kehutanan Aceh yang dilaksanakan Yayasan Leuser Internasional untuk AFEP di Takengon Aceh Tengah 12 Mei 2008. MDF AFEP memberikan dukungan pelatihan teknis terhadap 250 polhut dalam pengamanan hutan Aceh khususnya di Kawasan Ekosistem Leuser.

(Foto:Gerald Farizi)

Pengembangan Perekonomian dan Mata Pencaharian

Multi Donor Fund mendukung pengembangan perekonomian yang berkelanjutan di Aceh dan Nias melalui investasi, pemberian pekerjaan dan mata pencaharian.

MDF telah berkomitmen untuk mengadakan lingkungan yang lebih kuat untuk pengembangan perekonomian dalam jangka panjang. Pada bulan September 2008, Komite Pengarah telah menyetujui alokasi sebesar AS\$50 juta untuk Fasilitas Pendanaan Pengembangan Perekonomian, sebuah proyek baru yang khusus ditujukan untuk mendukung peluang ekonomi yang berkelanjutan dalam berbagai sektor mata pencaharian di Aceh. Proyek ini akan berkontribusi kepada pemulihan ekonomi pasca tsunami dan bertujuan untuk mengembangkan lingkungan usaha yang lebih bersaing dan mendukung keperluan untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas di sektor swasta, dengan sasaran orang miskin dan kelompok rentan lainnya. Proyek ini juga akan mendanai pengelolaan proyek dan peningkatan kapasitas. Proyek tersebut akan mendukung pengembangan kegiatan produksi, pemrosesan dan manufaktur dalam sub-sektor pertanian dan perikanan,

serta mendukung peningkatan akses ke pasar. Peningkatan investasi nasional maupun luar negeri di Aceh merupakan tujuan selanjutnya dari proyek ini.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah menggerakkan ekonomi di Aceh dan Nias sejak bencana tsunami dan gempa bumi. Kegiatan rekonstruksi telah menciptakan kebutuhan besar peluang kerja bagi masyarakat yang terkena bencana tersebut, dimana sebagian besar penduduk yang sebelumnya berkecimpung dalam kegiatan pertanian atau perikanan berpindah haluan sebagai tenaga harian yang dipicu oleh rekonstruksi. Dengan semakin dekat berakhirnya masa ini, sumber pekerjaan dan penghasilan lain yang berkelanjutan perlu dibangkitkan, terutama dalam sektor-sektor kunci pertanian dan perikanan, untuk memastikan berlanjutnya pembangunan dan pengamanan mata pencaharian.

Proses-proses terpadu dalam pemulihan masyarakat telah mempromosikan kembalinya kegiatan ekonomi berskala kecil. Program Pengembangan Kecamatan di Nias dan proyek pemulihan masyarakat lainnya juga telah menghasilkan lapangan kerja melalui kegiatan pemulihan masyarakat dan infrastruktur serta dukungan langsung kepada kegiatan ekonomi berskala kecil.



A HOME BUSINESS

Akses ke pendanaan untuk perempuan memberi kesempatan untuk mengembangkan usaha dari rumah.
(Foto: Siti Rahmah)

Menciptakan sinergi dan fokus pada keberlangsungan dan kualitas dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi mendukung proses “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” (Building Back Better).

Koordinasi pada tingkat portofolio menekankan pendekatan menyeluruh Multi Donor Fund dalam proses rekonstruksi. Beberapa wilayah penting dimana MDF membangun sinergi di seluruh proyek termasuk yang berikut ini:

- **Pengurangan kemiskinan dan pemulihan mata pencaharian merupakan sasaran kunci.** Sebagai hasilnya, mendukung mata pencaharian dalam berbagai sektor merupakan komponen dalam sejumlah besar proyek Multi Donor Fund seperti program-program Pengelolaan Limbah, Hutan Aceh & Lingkungan Hidup, dan Penguatan Organisasi Masyarakat Madani. Program mata pencaharian di bawah proyek Pengelolaan Limbah berfokus pada pendaurulangan sampah dan limbah tsunami. Program demikian bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam proses pemulihan dan seterusnya melalui kegiatan yang peka terhadap lingkungan hidup dan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.
- **Penguatan lembaga-lembaga dan membangun kapasitas merupakan komponen penting dalam sebagian besar proyek-proyek.** Mayoritas proyek dalam portofolio MDF bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kapasitas setempat dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan program melalui pendayagunaan masyarakat setempat, lembaga, organisasi masyarakat madani dan pemerintah. Hal ini sangat penting selagi BRR bersiap-siap untuk mengalihkan tanggung jawab untuk proyek-proyek yang sedang berlangsung dan aset-aset yang telah diselesaikan kepada pemerintah daerah.

- **Keberlanjutan lingkungan hidup.** Membangun kesadaran akan lingkungan hidup dan kapasitas untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengamannya penting tidak hanya dalam Program-Program Hutan Aceh & Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Tsunami, tetapi juga penting bagi semua proyek. MDF bertujuan untuk menanganikan keberlangsungan lingkungan hidup terhadap pelaksanaan semua proyek lainnya termasuk infrastruktur dan pemulihan masyarakat.
- **Penguatan keberlanjutan sosial dan peran perempuan dalam rekonstruksi.** Peran masyarakat dalam upaya rekonstruksi merupakan salah satu fokus inti dalam beberapa program MDF. Peran serta perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan pendekatan yang penting di seluruh portofolio program pemulihan masyarakat termasuk Program Pengembangan Kecamatan, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Rehabilitasi & Rekonstruksi Perumahan Masyarakat.
- **Koordinasi antar proyek menghasilkan dampak yang saling mendukung.** Proyek Bantuan Teknis untuk BRR dan Program Transformasi Pemerintah Aceh bertujuan membangun kapasitas untuk mendukung transisi aset dan tanggung jawab BRR kepada Pemerintah Propinsi Aceh. Program yang serupa sedang diusulkan bagi Nias.
- **Menghubungkan infrastruktur ke pengembangan perekonomian.** Meningkatkan akses ke peluang dan pasar ekonomi melalui rekonstruksi infrastruktur seperti jalan-jalan dan pelabuhan-pelabuhan merupakan komponen penting dalam mendukung pengembangan perekonomian jangka panjang Aceh dan Nias.



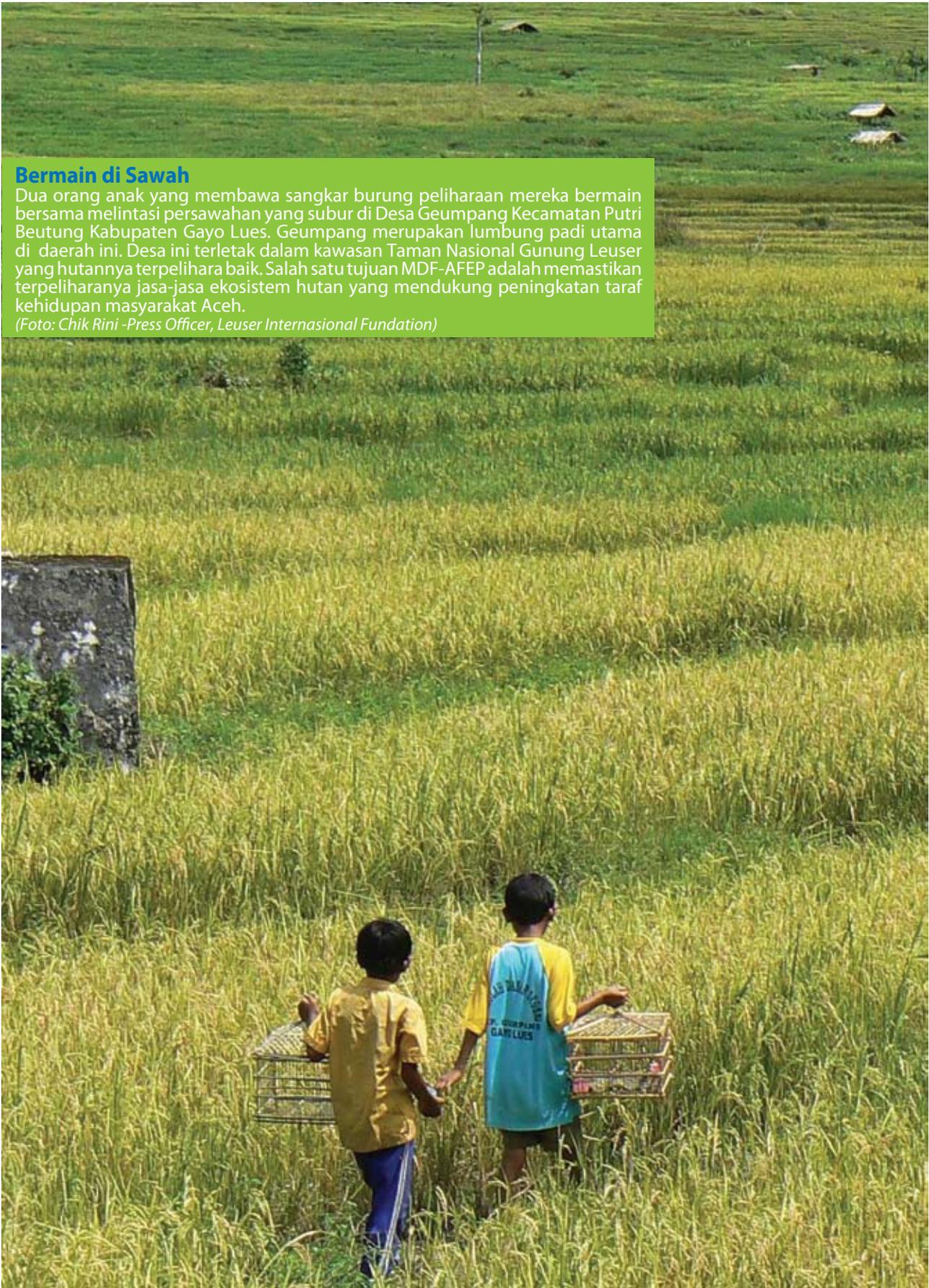
LIVELIHOOD

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perbaikan lahan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari
(Foto: Marzi Afriko - World Bank Consultant)

Bermain di Sawah

Dua orang anak yang membawa sangkar burung peliharaan mereka bermain bersama melintasi persawahan yang subur di Desa Geumpang Kecamatan Putri Beutung Kabupaten Gayo Lues. Geumpang merupakan lumbung padi utama di daerah ini. Desa ini terletak dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang hutannya terpelihara baik. Salah satu tujuan MDF-AFEP adalah memastikan terpeliharanya jasa-jasa ekosistem hutan yang mendukung peningkatan taraf kehidupan masyarakat Aceh.

(Foto: Chik Rini -Press Officer, Leuser Internasional Fundation)





MENELAAH PAPAN ALOKASI PENDANAAN

Jajaran pimpinan Kecamatan Tringgadieng, Kabupaten Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam serius mendengar penjelasan Fasilitator Kecamatan tentang peringkat kegiatan di desa-desa yang mendapat prioritas dalam Musyawarah Antar Desa Pendanaan III dalam program KDP. IDI tahun 2008, program nasional ini mampu mengangkat derajat tarap hidup yang lebih baik untuk hampir 6000 desa di Aceh. (Foto: Hendra Syahputra - Conflict and Development, World Bank Consultant)

BAB 3 LAPORAN KEUANGAN

Komitmen

Sampai dengan 30 September 2008, Multi Donor Fund (MDF) telah menerima komitmen sejumlah AS\$692 juta dari 15 donor yang berbeda sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 3.1. Oleh karena tidak semua komitmen berbentuk Dollar AS dan belum semuanya diterima, jumlah komitmen secara keseluruhan berbeda sesuai dengan kurs mata uang pada akhir periode pelaporan.

Tabel 3.1: Komitmen dan Kontribusi Multi Donor Fund per 30 September 2008

Sumber	Jumlah Komitmen Dalam \$AS	% Jumlah Komitmen
Komisi Eropa*	272,62	39%
Pemerintah Belanda	171,60	25%
Pemerintah Inggris*	73,71	11%
Pemerintah Kanada	25,55	3,7%
Bank Dunia	25,00	4%
Pemerintah Swedia	20,72	3,0%
Pemerintah Norwegia	19,57	2,8%
Pemerintah Denmark	18,03	2,6%
Pemerintah Jerman	13,93	2,0%
Pemerintah Belgia	11,05	1,6%
Pemerintah Finlandia	10,13	1,5%
Bank Pembangunan Asia	10,00	1,4%
Pemerintah Amerika Serikat	10,00	1,4%
Pemerintah Selandia Baru	8,80	1,3%
Pemerintah Irlandia	1,20	0,2%
Jumlah Komitmen	691,92	100%

Dalam periode pelaporan berjalan (Oktober 2007 hingga September 2008) MDF menerima kontribusi tambahan dari Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Kanada sejumlah AS\$16 juta.

Dana yang tersedia

Semua komitmen yang telah diformalisasikan melalui perjanjian kontribusi yang ditanda-tangani antara MDF dengan para donor, dan MDF telah menerima AS\$472 juta dari keseluruhan komitmen dari para donor. Proyek dana tunai dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa MDF memiliki dana yang cukup untuk melakukan kegiatan.

Alokasi Pendanaan dan Komitmen

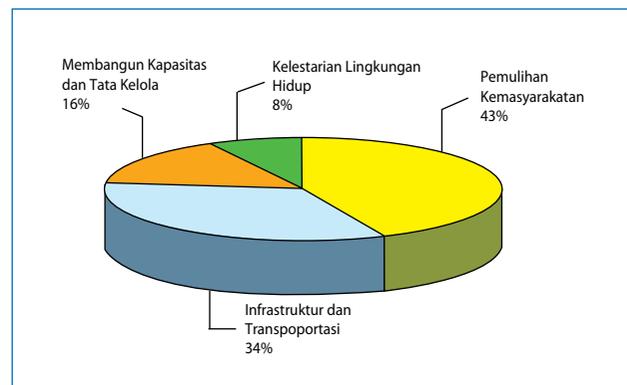
Sampai dengan 30 September 2008, MDF telah mengalokasikan AS\$ 515 juta ke 18 proyek di empat bidang: pemulihan masyarakat, infrastruktur dan transportasi, pembangunan kembali tata kelola dan dukungan terhadap kelestarian lingkungan hidup. BRR telah berkomitmen untuk berkontribusi AS\$236 juta dari dana mereka untuk bersama mendanai empat proyek yang terdapat di portofolio MDF.

Selama tahun laporan terakhir, Panitia Pengarah telah berkomitmen untuk tambahan AS\$85 juta bagi pendanaan empat konsep proyek baru. Usulan tersebut berfokus kepada pembangunan ekonomi dan persiapan menghadapi bencana dan peningkatan kapasitas. Sebagai tambahan, sejumlah AS\$14 juta telah disetujui untuk mendanai

Program Angkutan Laut & Logistik, Program Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal Pedesaan, Program Bantuan Teknis untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (BRR), dan Program Percepatan Daerah Tertinggal dan Khusus.

Sebagian besar dari dana (43%) yang dialokasikan oleh MDF adalah untuk Pemulihan Masyarakat, sebagaimana terurai dalam Grafik 3.1. Sektor Infrastruktur dan Transportasi menerima 34%, sedangkan proyek-proyek dalam Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Kelola menerima 23% dari total dana yang teralokasi. Dalam rapat Komite Pengarah ke-17 yang diadakan pada bulan September 2008, BRR menyajikan analisa mengenai bidang-bidang yang menjadi prioritas yang masih memerlukan pendanaan.

Grafik 3.1: Alokasi Sektoral per 30 September 2008



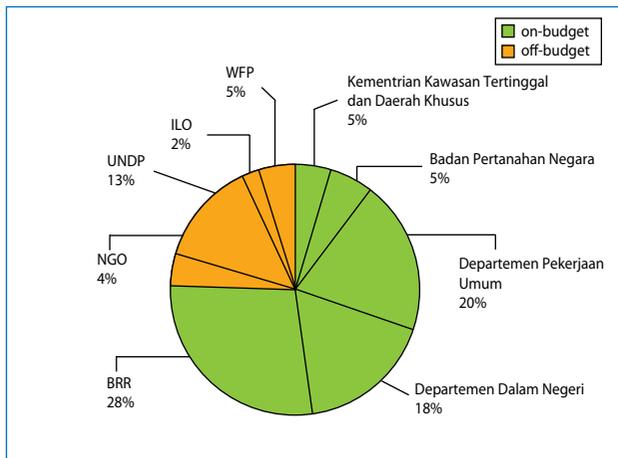
PERUMAHAN

Akuntabilitas masyarakat dalam mengelola dana menunjukkan hasil yang efektif dalam rekonstruksi perumahan.

(Foto:Rekompak)

Sekitar 75% dari dana yang dialokasikan ke proyek-proyek dalam portofolio MDF disalurkan melalui APBN Indonesia. Dana yang tersisa disalurkan melalui United Nations Development Programme (UNDP), World Food Program (WFP), International Labor Organization (ILO) dan NGO, seperti yang digambarkan dalam Grafik 3.2.

Grafik 3.2 Alokasi Dana untuk setiap Badan Pelaksana per 30 September 2008



Penyaluran Dana

Sampai dengan September 2008, Multi Donor Fund telah menyalurkan dana sebesar AS\$334 juta (sekitar 65% dari dana yang dialokasikan) ke 18 proyek. Sekitar AS\$234 juta telah disalurkan kepada Pemerintah Indonesia untuk pendanaan kegiatan proyek on-budget, sedangkan dana yang tersisa disalurkan kepada proyek-proyek off-budget.

Tinjauan Selanjutnya

Jumlah dana yang belum teralokasikan dalam anggaran Multi Donor Fund per 30 September 2008 adalah sebesar AS\$ 57 juta¹.

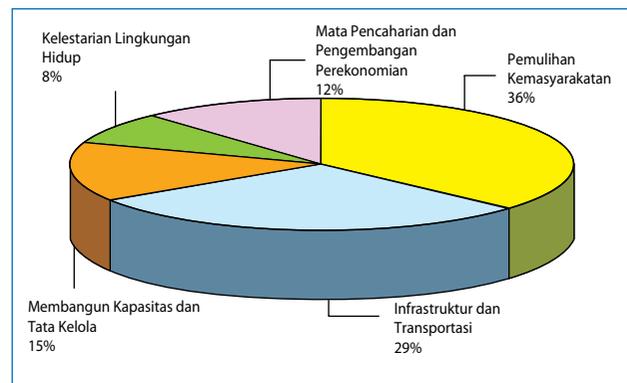
Setelah 30 September 2008, MDF telah memberi komitmen AS\$3,9 juta kepada Proyek Transisi Pulau Nias dan tambahan sejumlah US\$15 juta untuk tahap 3 dari Program Pengelolaan Limbah Tsunami.

Berdasarkan alokasi dan komitmen dalam periode pelaporan, 11% dari portofolio MDF saat ini mencakup dukungan untuk Pengembangan Mata Pencaharian dan Perekonomian.

Tanggal berakhirnya MDF telah diperpanjang hingga akhir tahun 2012. Namun demikian, dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk persiapan dan pelaksanaan proyek, pengalokasian sisa dana sangat penting untuk segera dilakukan.

1. Perkiraan dana yang tersisa dapat berubah sebagai akibat dari fluktuasi dalam nilai tukar uang dan tingkat suku bunga.

Grafik 3.3 Alokasi dan Komitmen Sektoral per 30 September 2008



Tarona Tambon Baroh

Tarona Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara adalah Balai Latihan Kerja (BLK) Perbengkelan. BLK ini di danai oleh MDF-PPK sebesar Rp. 216 juta dan swadaya desa sebesar Rp. 15 juta. Banyak anak-anak dari Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Perbengkelan di Aceh Utara magang di BLK tersebut dan tidak sedikit juga BLK melatih anak-anak muda Gampong Tambon Baroh.
(Foto: Siti Rahmah)





MENGGIRING GAJAH SUMATRA KEMBALI KE HUTAN

Penanggulangan konflik gajah dan manusia di Desa Le Jerneh dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat di Kecamatan Sampoinet dengan mengembalikan gajah ke habitatnya di dalam kawasan Ekosistem Ulumasen melalui metode tradisional.
(Foto: Mahdi Ismail - FFI)

BAB 4 MELIHAT KEDEPAN KEARAH PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias menanggapi perubahan penting baik di dalam konteks rekonstruksi keseluruhan dan dalam portofolionya menyambut tahun kelima keberadaan mereka. Penutupan BRR akan memberikan dampak kepada MDF baik dalam operasinya maupun portofolionya karena pemerintah lokal dan badan yang terkait mengambil alih proyek dan asset yang sudah direkonstruksi. MDF telah memperpanjang masa operasinya dan akan berkontribusi pada pemulihan Aceh dan Nias sampai 2012, dan saat ini tengah meninjau kembali kinerjanya dengan focus pada peningkatan dan pandangan kedepan. Pada saat yang sama, konteks perekonomian Aceh berubah akibat pengaruh dari penurunan kegiatan rekonstruksi yang telah mendukung perekonomian lokal selama bertahun-tahun, dan hal ini juga akan memberikan implikasi terhadap prioritas pendanaan baru.

Perubahan Konteks Operasional

Sebuah Keputusan Presiden yang tengah dipersiapkan diharapkan untuk menjabarkan pengaturan penutupan BRR. Komposisi dari Panitia Pengarah Multi

Donor Fund akan diformalisasi pada saat keputusan ini disetujui. Setelah Desember 2008, Bappenas, Pemerintah Propinsi dan kementerian akan mengambil alih tanggung jawab BRR.

Pengaturan transisi untuk proyek Multi Donor Fund harus diformalisasi sebelum penutupan BRR. Sebuah Keputusan Presiden akan menjabarkan pengaturan pemerintah untuk melaksanakan upaya rekonstruksi setelah transisi. Hal ini menentukan alur dana yang relevan melalui badan pemerintah, dan dampak dari peran koordinasi pemerintah di tingkat portofolio. Proyek telah mengidentifikasi pengaturan yang sudah diantisipasi, dan tim proyek tengah bekerja dengan pemerintah untuk menjamin pengalihan yang mulus kepada kementerian. Amandemen terhadap perjanjian hibah proyek akan diperlukan. Dukungan yang berlanjut terhadap program on-budget yang sesuai dengan Rencana Induk Pemerintah sangat penting. Hal ini akan memungkinkan pemerintah lokal untuk menyelaraskan keperluan pembangunan dari masyarakat dengan objektif proyek.

Portofolio MDF dalam Menanggapi Perubahan Keperluan

Pada tahun depan, proyek yang tengah berjalan diharapkan untuk mencapai target. Pelaksanaan proyek akan selesai pada Juni 2012 untuk memberikan cukup waktu kepada MDF untuk menutup proyek dan operasinya. Oleh karena itu, semua dana tersisa harus diprogramkan pada pertengahan 2009. Keterbatasan waktu ini memberikan tantangan signifikan kepada Multi Donor Fund, terutama dalam upaya untuk menjamin bahwa mekanisme, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan tersedia pada institusi yang relevan untuk menjaga investasi yang cukup besar yang dilakukan pada rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias.

Penggunaan dana tersisa akan berfokus kepada infrastruktur, penguatan kelembagaan dan pembangunan ekonomi. Informasi Terkini Ekonomi Aceh (Aceh Economic Update) menunjukkan adanya penurunan pada kegiatan ekonomi di Aceh¹. Keberlangsungan perekonomian di Aceh dan Nias karenanya adalah hal penting dalam upaya mendatang untuk mengatasi perlambatan proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang merupakan pendorong bagi perekonomian Aceh selama empat tahun terakhir. Ini adalah kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pembangunan sebuah sektor swasta yang kuat untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Aceh telah mengidentifikasi pembangunan

ekonomi sebagai bidang prioritas untuk investasi. Mereka juga menyadari bahwa reformasi kebijakan dan kerangka peraturan untuk investasi dan meningkatkan infrastruktur akan menghilangkan halangan terhadap pembangunan ekonomi. Di Nias, peningkatan akses terhadap kesempatan ekonomi dan pengurangan kerentanan terhadap bencana adalah prioritas yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan dari investasi rekonstruksi di masa depan.

Sumber daya umum Aceh dari dana otonomi khusus merupakan kesempatan unik untuk mendukung keberlanjutan rekonstruksi dan transisi kepada pembangunan. pada tahap proses rekonstruksi selanjutnya, proyek baru akan melengkapi program yang dimulai oleh Pemerintah Aceh. Proyek-proyek yang dipilih untuk pendanaan di masa mendatang akan berfokus pada peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan yang terintegrasi dan bertema lintas sektor. Sumber daya Multi Donor Fund yang tersisa akan digunakan untuk mendukung program pemerintah lokal dan pembiayaan bersama di sektor prioritas yang disetujui. Melalui pendekatan ini, Multi Donor Fund akan berkontribusi dalam membangun kapasitas dari Pemerintah Aceh dan Nias untuk mengelola aset dari investasi yang dibuat pada waktu rekonstruksi dan menguatkan kemampuan mereka untuk menggunakan sumber daya mereka sendiri secara efektif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1. Aceh Economic Update Oktober 2008; Bank Indonesia dan Bank Dunia



DIALOG KEBIJAKAN

Dialog Kebijakan yang diselenggarakan MDF memberi masukan dalam pelaksanaan rekonstruksi di Aceh dan Nias.
(Foto:G. Inge Susilo)

Sebuah Komitmen untuk Meningkatkan Kualitas dan Kinerja

Multi Donor Fund tengah menilai kinerja dan pencapaiannya seraya melihat kedepan. Pada tahun 2008, telah dilakukan tinjauan untuk menilai seberapa baik komitmen Multi Donor Fund dalam memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Sebuah tinjauan tengah masa yang bersifat independen untuk mengevaluasi

kinerja portofolio dan operasional MDF telah dimulai dimana tinjauan tersebut akan memberikan pandangan menyeluruh pencapaian MDF dalam proses rekonstruksi dan rekomendasi untuk masa tugas MDF selanjutnya. Pelajaran berharga yang didapat dari pengalaman Multi Donor Fund akan digunakan tidak hanya untuk meningkatkan operasi portofolio MDF sendiri tetapi juga akan dibagikan secara luas sehingga rekomendasi kearah masa depan dapat meningkatkan kualitas upaya rekonstruksi paska bencana lainnya dalam konteks berbeda.



CSO
Pengawasan rekonstruksi oleh masyarakat dapat terjadi melalui fasilitasi organisasi-organisasi kemasyarakatan.
(Foto:CSO)

Tempat Belajar Baru

Pendidikan dini bagi anak-anak untuk menghadapi bencana yang dikemas dalam belajar sambil bermain merupakan pengenalan secara efektif. Program pendidikan ini didanai oleh MDF untuk kegiatan penanggulangan bencana. (Foto: Zulfan Amru)



PORTOFOLIO PROYEK

No.	Proyek	Anggaran (US \$ juta)
1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat (Rekompak)	85.00
2	Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	64.70
3	Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	17.96
4	Proyek Pengembangan Kecamatan di Nias (KRRP)	25.75
5	Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (RALAS)	28.50
6	Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh	4.50
7	Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP)	42.00
8	Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF)	100.00
9	Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang	1.46
10	Program Angkutan Laut dan Logistik (SDLP)	24.70
11	Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP)	3.78
12	Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP)	9.92
13	Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal Pedesaan	11.80
14	Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)	25.00
15	Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh dan Nias	6.00
16	Program Bantuan Teknis untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias (TA to BRR)	22.48
17	Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup (AFEP)	17.53
18	Program Pengelolaan Limbah Tsunami (TRWMP)	24.41
Total Alokasi Proyek		515.49

1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat (Rekompak)

<i>Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat memberikan hibah kepada 130 kelompok masyarakat untuk membangun dan memperbaiki kembali rumah serta memperbaiki infrastruktur perumahan melalui pendekatan yang berbasis masyarakat.</i>	Nilai Hibah	US \$ 85 juta
	Periode Pelaksanaan	Oktober 2005 - Februari 2009
	Badan Mitra	Bank Dunia
	Badan Pelaksana	Departemen Pekerjaan Umum
	Penyaluran	US \$ 81.66 juta

Proyek ini mengisi kesenjangan atas kebutuhan perumahan untuk 130 kelompok masyarakat. Dengan dukungan penuh oleh proyek ini, masyarakat bersama-sama memetakan dan menilai kerusakan yang terjadi pada komunitas mereka untuk kebutuhan konstruksi dan mengidentifikasi pihak yang berhak atas bantuan perumahan. Penerima hibah akan membangun sekitar 8,000 rumah dan memperbaiki sekitar 7,000 rumah. Proyek ini adalah satu-satunya proyek yang membantu perbaikan rumah-rumah yang rusak. Proyek ini juga memberikan hibah untuk membangun infrastruktur komunitas berdasarkan rencana yang disepakati bersama. Fasilitator-fasilitator yang ada pada proyek perumahan ini berusaha untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

Pencapaian sampai saat ini

Pendekatan yang mementingkan masyarakat terbukti lebih efisien dalam membangun kembali rumah-rumah yang rusak dalam jangka waktu yang sangat terbatas. Pendekatan ini juga telah menimbulkan rasa kepemilikan yang kuat di antara para penerima manfaat dan rasa bangga terhadap pencapaian yang mereka lakukan. Walaupun tingkat hunian dari rumah-rumah yang diperbaiki itu sebesar 100% dan sekitar 86% dari rumah-rumah yang baru dibangun, proyek ini berusaha untuk terus bekerja dengan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Hibah tahap pertama yang memprioritaskan infrastruktur telah dikururkan pada 120 desa. Lebih dari 10% penerima manfaat dari proyek ini telah menyelesaikan kegiatan mereka dan menerima pembayaran tahap ke dua.

Tantangan

Kemajuan perbaikan rumah-rumah tidak secepat perkiraan semula untuk memastikan peningkatan kualitas. Hal ini diakibatkan oleh keengganan dari para pemilik rumah menerima perubahan-perubahan yang diusulkan dan kemampuan pekerjaan teknis yang rendah yang dimiliki oleh para pekerja. Proyek telah melakukan audit terhadap kualitas rumah yang komprehensif dan memperkenalkan perbaikan struktur bangunan. Meningkatkan tingkat hunian rumah-rumah baru merupakan tantangan lain.

Hasil Per 30 September, 2008	Target	Pencapaian	
Rumah-rumah yang direkonstruksi	8,004	6,554	81%
▪ Selesai			
▪ Masih dalam proses rekonstruksi	1,450	19%	
Rumah-rumah yang direhabilitasi	6,999	6,911	98%
▪ Selesai			
▪ Masih dalam proses rehabilitasi	88	2%	
Rencana perumahan masyarakat	126*	126	100%
Lapangan kerja jangka pendek yang dihasilkan (orang-hari)	Tidak tersedia	7,767,662	

* Target awal 128 telah dirubah menjadi 126.



RUMAH
Rumah yang direhabilitasi
(Foto: Rekompak)

2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

<i>Program Pengembangan Kecamatan (PPK) memberikan hibah secara langsung kepada desa-desa untuk melangsungkan program konstruksi yang dipelopori oleh masyarakat. Program ini mendukung perbaikan infrastruktur masyarakat di 2,900 desa di Aceh dan Nias.</i>	Nilai Hibah	US \$ 64.70 juta
	Periode Pelaksanaan	Agustus 2005 - Desember 2008
	Badan Mitra	Bank Dunia
	Badan Pelaksana	Departemen Dalam Negeri
	Penyaluran	US \$ 64.70 juta

Di PPK, masyarakat menentukan kebutuhan prioritas mereka berkaitan dengan infrastruktur tersier dan bantuan untuk kegiatan-kegiatan perekonomian atau kelompok-kelompok yang rentan secara sosial. Hibah yang berjumlah US\$ 49.9 juta telah secara langsung disalurkan ke kecamatan-kecamatan dimana keputusan-keputusan mengenai pendanaan yang harus dialokasikan untuk desa-desa di bawah kepemimpinan mereka. PPK memiliki mekanisme pemantauan lapis ganda untuk mencegah korupsi yang mungkin terjadi pada perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek desa.

Pencapaian sampai saat ini

Hingga saat ini semua dana sudah dicairkan ke rekening-rekening kecamatan kecuali di Pidie dan Aceh Besar. Lebih dari 90% dari dana yang digunakan untuk infrastruktur. Pada tahun anggaran 2007, BRR menyalurkan lebih dari US\$ 13 juta untuk mendanai dana hibah 74 kecamatan yang akan menambahkan program PNPM nasional US\$ 9.5 juta yang memberikan bantuan bagi 131 kecamatan.

Tantangan

Proyek ini mungkin akan memperpanjang periode penyelesaiannya lebih lama dari waktu yang disediakan saat ini karena dua kecamatan belum menghabiskan semua dana hibah mereka. Sebagai tambahan sangatlah penting untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang mementingkan komunitas dengan sumber dana lain misalnya dari pinjaman nasional dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Hasil Per 30 September, 2008	Sasaran	Pencapaian
Jalan yang diperbaiki/dibangun (km)	2,412	2359
Jembatan yang diperbaiki/dibangun (unit)	1,007	932
Irigasi dan drainase (unit)	931	1,211
Proyek air bersih (unit)	598	621
Penampungan Air (unit)	118	118
Unit sanitasi (unit)	939	778
Pasar (unit)	21	20
Bangunan sekolah (unit)	289	274
Puskesmas/pos kesehatan (unit)	33	10
Nilai beasiswa (jumlah penerima)	US \$ 380,604 (6,052)	US \$ 329,967** (6,022)
Nilai untuk pinjaman	US \$ 379,000	US \$ 346,544**
▪ Jumlah penerima	• 4,045	• 3,685
▪ Jumlah usaha/kelompok	• 350	• 350
Orang yang dipekerjakan melalui sub-proyek	Tidak tersedia	429,421
Hari kerja yang dihasilkan	Tidak tersedia	5,053,529
Dana bantuan bencana	US \$ 4,528,898	US \$ 4,502,470**



MUSYAWARAH ANTARA DESA KHUSUS

Para warga, kepala desa, fasilitator desa dan para pelaku kegiatan desa berkumpul untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap kegiatan program MDF-PPK yang sudah dilakukan di desa mereka.

(Foto: Siti Rahmah - World Bank Consultant)

* Target akhir masih dalam proses verifikasi melalui penyelesaian laporan karena perubahan dari cakupan kerja yang telah direncanakan sebelumnya, misalnya karena adanya peningkatan harga

**angka yang dilaporkan dalam Rupiah, nilai tukar rupiah: US \$ 1 = IDR 9,000.

3. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

<i>Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) memberikan hibah secara langsung kepada 271 komunitas untuk merehabilitasi dan mengembangkan infrastruktur masyarakat perkotaan di Aceh.</i>	Nilai Hibah	US \$ 17.96 juta
	Periode Pelaksanaan	Agustus 2005 - Desember 2009
	Badan Mitra	Bank Dunia
	Badan Pelaksana	Departemen Pekerjaan Umum
	Penyaluran	US \$ 17.9 juta

P2KP mendorong pendekatan perencanaan dari tataran bawah ke atas yang bersifat partisipatif untuk mengidentifikasi kebutuhan utama rekonstruksi dan pemulihan kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan. Proyek ini diselenggarakan oleh komite lingkungan yang terpilih secara demokratis dan melibatkan sukarelawan untuk melakukan penilaian kerusakan yang terjadi, mengembangkan rencana pembangunan masyarakat dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang akan didanai melalui proyek. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sangatlah penting untuk kesuksesan dari proyek ini.

Pencapaian sampai saat ini

Implementasi di tingkat komunitas sebagian besar telah selesai. Masyarakat yang berada di luar Banda Aceh seringkali memilih untuk mengerjakan sendiri daripada membayar pekerja. Dengan menggunakan metode ini hasilnya justru meningkat sangat signifikan. Untuk meningkatkan manfaat langsung bagi perempuan, P2KP memperkenalkan komponen dua fase bagi pemberdayaan perempuan di tahun 2008. Pada Fase I tersedia US\$ 11,100 bagi 50 kelompok masyarakat perkotaan untuk memperkuat peran dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan proyek. Fase II dimulai berdasarkan kelebihan-kelebihan pada fase pertama, kini sedang dalam pelaksanaan dan menargetkan 50 kelompok perkotaan yang menunjukkan kinerja terbaik.

Tantangan

Tantangan yang terus menerus muncul adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan memastikan bahwa kualitas itu sejalan dengan rencana infrastruktur kelurahan yang terintegrasi. Selain itu, masih ada kesempatan untuk meningkatkan pelaksanaan dan komponen pemeliharaan untuk menjamin keberlanjutan dari investasi. Meningkatkan manfaat nyata bagi perempuan merupakan satu tantangan lain yang harus dihadapi oleh proyek ini.

Hasil Per 30 September, 2008	CDP ¹	Rencana Awal	Pencapaian
Jalan yang diperbaiki/dibangun (km)		61	226
Rekonstruksi jembatan (unit)		6,150	1,282
Drainase (km)		37	165
Proyek air bersih (unit)		79	787
Unit sanitasi		22	281
Bangunan sekolah (unit)	119	N/A	1
Siswa yang menerima beasiswa	8,420	N/A	3,430
Nilai beasiswa (US\$)	440,639	N/A	74,043
Puskesmas/pos kesehatan		28	9
Fasilitas pengolahan sampah		284	684
Jumlah hari yang dihasilkan	6,356,016	N/A	1,056,195
Dana bantuan sosial	3,692,231	N/A	726,877
Balai desa (unit)	171	N/A	120



Akses ke air bersih merupakan wujud impian masyarakat kota
(Foto:UPP)

¹ CDP: Community Development Plan → Rencana Pembangunan Komunitas (Kebutuhan masyarakat akan proyek rehabilitasi yang dapat didanai oleh sumber-sumber lain bukan hanya MDF)

4. Proyek Pengembangan Kecamatan di Nias (KRRP)

<i>Proyek Pengembangan Kecamatan di Nias (KRRP) memberikan hibah untuk rekonstruksi 5,000 rumah, 100 sekolah dan infrastruktur publik lainnya di Nias. KRRP dikembangkan dari proses partisipatif dari KDP dan berusaha meningkatkan perencanaan sektoral dari pemerintah kabupaten.</i>	Nilai Hibah	US \$ 25.75 juta
	Periode Pelaksanaan	November 2006 - Desember 2009
	Badan Mitra	Bank Dunia
	Badan Pelaksana	Departemen Dalam Negeri melalui BRR
	Penyaluran	US \$ 10.2 juta

Proyek ini mengacu dari pengalaman proyek perumahan Aceh REKOMPAK, dan juga ikut menyumbangkan rehabilitasi terhadap perumahan dan pendidikan di Nias. Proyek ini bertujuan untuk membangun 5,000 rumah dan memperbaiki 100 sekolah dan 100 balai kabupaten/desa. KRRP memiliki kemungkinan untuk mencakup warisan budaya dan juga memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memfasilitasi perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat di masa yang akan datang.

Pencapaian sampai saat ini

Karena terjadi keterlambatan, kegiatan-kegiatan pada tahun 2007 dilaksanakan di tahun 2008. Pekerjaan konstruksi dilakukan di semua desa yang menjadi sasaran proyek ini, dan diharapkan bahwa target 2,138 unit rumah akan dapat tercapai. Pencairan dana sudah dilakukan untuk pembangunan sekolah, kantor desa dan infrastruktur.

Tantangan

Kegiatan-kegiatan konstruksi di Nias sangat dipengaruhi oleh tingginya angka kemiskinan, buruknya kualitas infrastruktur, dan keterpencilan pulau ini dari berbagai wilayah. Kapasitas pemerintah daerah bahkan lebih rendah sebelum tsunami terjadi, dan keberagaman budaya dari pulau ini mensyaratkan penyelesaian yang sesuai dengan konteks lokal yang menghargai norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Akibat dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya menyebabkan keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan proyek. Masalah manajemen Hasil Hutan telah diselesaikan melalui upaya Pengelolaan Hutan Rakyat.

Hasil Per 30 September, 2008	Target	Pencapaian
Cakupan Proyek		
▪ Jumlah kabupaten	2	2
▪ Jumlah kecamatan	9	9
▪ Jumlah desa/kelurahan	123	123
Rumah	5000*	1998 dalam proses pembangunan
Sekolah	100	1 dalam proses pembangunan
Infrastruktur desa (proyek)	48	8 dalam proses pembangunan



*Target ini perlu direvisi karena peningkatan biaya konstruksi. Target ini diperkirakan 4,750

5. Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (RALAS)

<p><i>Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan di Aceh (RALAS) adalah proyek untuk mengidentifikasi kepemilikan lahan dan menerbitkan sertifikat tanah. Dalam kurun waktu tiga tahun, pemilik tanah di Aceh dan Nias akan mendapatkan dokumen sertifikat resmi yang dapat menjadi dasar kuat untuk memulai kembali hidup mereka.</i></p>	Nilai Hibah	US \$ 28.5 juta
	Periode Pelaksanaan	Juni 2005 - Desember 2008
	Badan Mitra	Bank Dunia
	Badan Pelaksana	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
	Penyaluran	US \$ 11.7 juta

Tujuan-tujuan dari RALAS adalah untuk mendukung rekonstruksi hak kepemilikan dan penerbitan sertifikat kepemilikan lahan, serta mendukung rekonstruksi/pengembangan institusi pertanahan di Aceh dan membangun sistem administrasi pertanahan di propinsi tersebut. Proyek ini juga menunjukkan keterlibatan BPN dengan masyarakat dan LSM dalam melakukan inventarisasi pertanahan dan proses pertimbangan, karenanya proyek ini membantu dan mempercepat kegiatan-kegiatan rekonstruksi.

Semua kepemilikan tanah direstorasi melalui proses yang berlapis. Dengan difasilitasi oleh LSM atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat melakukan proses inventarisasi tanah sesuai dengan pedoman BPN. BPN memutuskan hasilnya dengan cara mengukur tanah dan memvalidasi kesepakatan pemilikan dan batas-batas kepemilikan. Hasil keputusan tersebut dipublikasikan selama empat minggu, diikuti dengan registrasi dan penerbitan sertifikat tanah. Proyek juga mengembangkan penyimpanan data administrasi yang moderen untuk mencegah kehilangan dokumen akibat bencana di masa yang akan datang. Sebagai tambahan, proyek juga merestorasi beberapa bangunan administrasi pertanahan yang hancur akibat tsunami. Semua pelayanan yang diberikan tidak dipungut bayaran.

Pencapaian sampai saat ini

Proyek ini telah memperkuat kapasitas manajemen pertanahan lokal. Sejak dimulainya proyek ini pada tahun 2005, RALAS telah memperkuat kapasitas daerah dalam administrasi pertanahan dan pengelolaannya, serta telah memberikan pelatihan bagi 700 fasilitator dari LSM dan juga bagi 610 orang pegawai BPN yang membantu dalam memfasilitasi pensurveyan pertanahan masyarakat yang mencakup 200,000 bidang tanah. Ditambah lagi, kantor perwakilan BPN di tingkat propinsi dan tiga kantor pertanahan di tingkat kabupaten telah direhabilitasi dan saat ini dua dari kantor itu digunakan. Kemajuan lebih jauh telah dibuat dalam hal komputerisasi dan pengembangan sistem pencatatan pertanahan di sembilan kabupaten dan kantor pertanahan tingkat propinsi. Proyek ini juga memfasilitasi penyelesaian perselisihan pertanahan di tingkat daerah; mengadvokasi dan mendorong pemberdayaan perempuan melalui kepemilikan lahan bersama; dan memperkenalkan sistem informasi pengelolaan pertanahan yang terkomputerisasi dan manajemen pencatatan.

Tantangan

Proyek ini berakhir pada bulan Desember 2008. Pencapaian hingga saat ini berada dibawah target. Perpanjangan periode pelaksanaan sedang dipertimbangkan.

Hasil Per 30 September, 2008	Target	Pencapaian
Sertifikat tanah yang diberikan	600,000	112,460
Sertifikat bersama dan kepemilikan perempuan	n/a	maksimal 40%
Sertifikat tanah yang dicatat pada buku catatan pertanahan	600,000	126,107
Bidang tanah yang disampaikan kepada masyarakat	600,000	158,972
Bidang tanah yang secara resmi disurvei oleh BPN	600,000	211,829
Pemetaan tanah masyarakat	600,000	207,341



Empat puluh persen penerima manfaat perempuan merupakan pemilik bersama atas sertifikat tanah.

6. Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh

<i>Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh akan membantu melindungi wilayah pusat bisnis di ibukota propinsi Aceh, Banda Aceh dari bencana banjir.</i>	Nilai Hibah	US \$ 4.5 juta
	Periode Pelaksanaan	April 2006 - Juni 2009
	Badan Mitra	Bank Dunia
	Badan Pelaksana	Muslim Aid
	Penyaluran	US \$ 2.1 juta

Sudah lama, bahkan sebelum tsunami terjadi, Banda Aceh rentan terhadap bencana banjir bahkan. Rusaknya pintu air dan mesin pemompa air telah mengakibatkan banjir periodik di wilayah dataran rendah di Banda Aceh. Tanpa perlindungan dari banjir, sarana-sarana publik maupun swasta yang telah di rekonstruksi akan rentan terhadap kerusakan baru. Proyek ini juga secara erat melakukan koordinasi dengan rencana rekonstruksi pencegahan banjir dan drainase pemerintah kota. Rencana itu juga termasuk memasang klep banjir dari karet dan memperbaiki sistem pemompaan dan drainase di Zona Drainase 2. Pegawai pemerintah dilatih untuk memastikan adanya upaya pemeliharaan dan keberlanjutan dari alat yang telah terpasang.

Pencapaian sampai saat ini

Pada awal 2006, proyek ini telah memasang 11 buah klep banjir untuk mencegah banjir pasang dan mengeringkan salah satu wilayah paling rentan terhadap banjir di Banda Aceh dengan mengurangi kemungkinan terjadinya banjir setelah hujan dan ketika pasang, sehingga akan berdampak pada rasa puas masyarakat. Kontrak pekerjaan sipil yang utama, yang mencakup tiga mesin pemompa merupakan tahap akhir konstruksi.

Proyek ini telah diperpanjang hingga bulan Juni 2009 dan menitikberatkan pada Zona 2. Pekerjaan yang menjadi kontrak utama telah ditenderkan ulang dan para kontraktor telah dimobilisasi untuk melakukan pekerjaan ini. Proyek ini kini berada dalam jalur untuk menyelesaikan implementasi pada pertengahan 2009.

Tantangan

Satu ancaman yang potensial dalam pelaksanaan rekonstruksi infrastruktur drainase adalah tersumbatnya drainase dengan limbah. Oleh karena itu proyek ini harus memastikan koordinasi dan integrasi dari kegiatan pengelolaan limbah lainnya.

Hasil Per 30 September, 2008	Target	Pencapaian
Penurunan banjir langsung melalui klep banjir	11	11
Sistem drainase yang dibangun kembali <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mesin pompa ▪ Klep banjir 	3 rumah pompa Semua klep banjir pada Zona 2	Proses pengerjaan Selesai tender
▪ Drainase (pembangunan/perbaikan)	4.4km/ 12.3km	Proses pengerjaan



Urban Drainage in zone 2, built by Muslim Aid

7. Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP)

<i>Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) memberikan perencanaan strategis, perancangan infrastruktur fisik dan dukungan pelaksanaannya, akan melancarkan rekonstruksi yang terkoordinasi di Aceh dan Nias.</i>	Nilai Hibah	US \$ 42.0 juta
	Periode Pelaksanaan	Juli 2006 - September 2009
	Badan Mitra	Bank Dunia
	Badan Pelaksana	BRR
	Penyaluran	US \$ 14.1 juta

IREP memberikan bantuan teknis di dua tingkatan: di bawah pengawasan BRR, sebuah Tim Manajemen Program Infrastruktur membantu perencanaan strategis dan koordinasi untuk semua kegiatan-kegiatan rekonstruksi untuk Aceh dan Nias, sedangkan tim teknis merancang infrastruktur dan memberi bantuan pelaksanaan. Pelaksanaan rancangan yang ada akan didanai melalui Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur, yang juga didanai oleh Multi Donor Fund dan BRR, serta melalui sumber-sumber dana yang lain.

Infrastruktur tingkat nasional, propinsi dan kabupaten dicakup di dalam IREP. Proyek ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan strategis, rancangan proyek, pelaksanaannya serta pengawasannya. IREP juga memfokuskan pada masalah operasional dan pemeliharaan untuk mempersiapkan peran pemerintah daerah secara lebih baik dalam memastikan keberlanjutan investasi rekonstruksi dan pembangunan daerah tersebut di masa yang akan datang.

Pencapaian sampai saat ini

Semua tim konsultan IREP dimobilisasi pada bulan Mei 2007. Pada periode laporan ini, kucuran hibah terhadap proyek ini meningkat. Tim konsultan IREP memberikan dukungan terhadap program IRFF dan program infrastruktur BRR. Rencana Infrastruktur Strategis, Rencana Investasi Infrastruktur Tahunan dan Rencana Pengadaan Tahunan untuk Aceh dan Nias telah diselesaikan dan disetujui oleh BRR. Tim ini juga mendukung pengembangan rencana investasi pada tataran regional bagi daerah pantai barat dan Nias.

Tim konsultan IREP telah membantu dalam mempersiapkan 63 paket investasi untuk membangun jalan sepanjang 748 km di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten, 16 sistem pengairan dan 5 pelabuhan. Dengan pelaksanaan proyek melalui IRFF, konsultan IREP kini terlibat dalam pengawasan konstruksi dan kegiatan pengendalian kualitas.

Tantangan

Dengan akan berakhirnya masa kerja BRR, proyek ini harus membantu dalam mendukung pengalihan program infrastruktur BRR serta program IRFF kepada pihak terkait yang berwenang.



IREP consultants supporting supervision of Gunung Sitoli Port, Nias

8. Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF)

<i>Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF) adalah proyek yang dibiayai bersama dengan BRR, untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur kunci yang diidentifikasi melalui Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur.</i>	Nilai Hibah	US\$ 291.0 juta (termasuk US\$191.0 juta pembiayaan bersama dari BRR)
	Periode Pelaksanaan	Juli 2006 - Desember 2009
	Badan Mitra	Bank Dunia
	Badan Pelaksana	BRR
	Penyaluran	US\$ 19.6 juta

IRFF meningkatkan fleksibilitas BRR untuk mendanai kegiatan infrastruktur, yang memungkinkan proyek untuk langsung didanai begitu mereka siap. Proyek ini mendanai infrastruktur di tingkat propinsi dan kabupaten yang teridentifikasi melalui kerangka Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP). Seperti halnya IREP, IREF menekankan pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dan propinsi. Kedua proyek berupaya memberikan kontribusi untuk strategi transisi BRR dengan melibatkan pemerintah daerah secara progresif dan pada akhirnya menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pelaksanaan kepada mereka.

Pencapaian sampai saat ini

Proyek ini telah menggunakan rencana investasi daerah dan juga strategi IREP untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang mungkin dilaksanakan. Memastikan kelestarian lingkungan dengan menyiapkan penilaian dampak lingkungan dan rencana manajemen yang berkaitan. Portofolio IRFF mencakup 57 sub-proyek senilai sekitar US\$ 227.4 juta. Hingga saat ini 56 kontrak telah dibuat dengan jumlah total US \$ 218.2 juta. Satu sub-proyek (bernilai sekitar US\$ 9.2 juta) masih pada tahap tender.

Tantangan

Sebanyak 50% dari portofolio IRFF (dalam hal nilai) diperkirakan akan dilaksanakan setelah masa tugas BRR berakhir. Oleh karena itu, memastikan kesinambungan investasi IRFF setelah masa tugas BRR sangatlah penting dalam memastikan bahwa investasi IRFF dapat diselesaikan setelah BRR tidak lagi berada di sana.

Hasil Per 30 September, 2008	Jumlah sub-proyek	Nilai
Selesai:	8	US \$ 7.79 m
▪ Sistem air	1	US \$ 1.98 m
▪ Jalan kabupaten	7/37 km	US \$ 5.81 m
Masih dalam pekerjaan:	48	US \$ 210.40 m
▪ Sistem air	11	US \$ 30.27 m
▪ Pelabuhan	5	US \$ 47.42 m
▪ Jalan	8/266 km	US \$ 37.92 m
▪ Jalan propinsi	9/317 km	US \$ 67.14 m
▪ Jalan kabupaten	15/153 km	US \$ 27.70 m
Masih dalam proses tender	1	US \$ 9.17 m
▪ Jalan kabupaten	1	US \$ 9.17 m



Sigli Water Supply

9. Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang

<p><i>Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang memelihara jalan yang membentang sepanjang 103 km dari Lamno ke Calang sejak November 2006 hingga Desember 2007. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memastikan akses ke daerah yang terkena dampak tsunami tidak terganggu sehingga dapat mempercepat rekonstruksi dan proses pemulihan serta mendorong pemulihan kondisi ekonomi sosial.</i></p>	Nilai Hibah	US \$ 1.5 juta
	Periode Pelaksanaan	Oktober 2006 - Desember 2007
	Badan Mitra	United Nations Development Programme (UNDP)
	Badan Pelaksana	United Nations Development Programme (UNDP)
	Penyaluran	US \$ 1.5 juta

Pada tahun 2006, sebagai akibat dari beban truk pengangkut yang berlebihan dan pemeliharaan yang buruk, jalan yang merentang antara Lamno-Calang rusak parah dan sering kali tidak dapat dilalui kendaraan, terutama pada musim hujan. Proyek ini memberikan pemeliharaan berkesinambungan yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa jalan dapat dilalui selama periode empat belas bulan.

Pencapaian sampai saat ini

Proyek ini selesai pada 31 Desember 2007 dan laporan penyelesaian telah diserahkan. Kurangnya dana dari pemerintah, keahlian dan sumber daya peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan darurat dalam kerangka waktu yang terbatas membuat proyek ini penting. Jalan Lamno-Calang merupakan rute transportasi utama untuk pengangkutan barang-barang ke pantai barat. Proyek ini dipandang sebagai keberhasilan sebuah investasi penting dalam proses rekonstruksi dan pemulihan, meskipun nilainya relatif kecil.

Hasil Desember	2007
Jalan yang dikeraskan (km)	52
Penggalian selokan (km)	132
Dek jembatan yang diperbaiki (km)	21
Jembatan baley yang terpasang (unit)	4
Lapangan kerja jangka pendek yang diciptakan (hari kerja)	3,000



PEMBANGUNAN JEMBATAN DI ACEH BESAR

Sejumlah pekerja sedang memperbaiki pengait di jembatan jalan Banda Aceh – Calang. MDF telah mendanai perawatan jalan sepanjang 103 km antara Lamno-Calang untuk menjamin akses darat di jalur tersebut.
(Foto : Isra Safril)

10. Program Angkutan Laut dan Logistik (SDLP)

<p><i>Proyek ini memenuhi kebutuhan vital selama rekonstruksi dengan cara mendukung jalur transportasi barang-barang dan kargo ke wilayah yang terkena dampak tsunami, termasuk daerah terpencil di Nias dan Simeulue. Setahun terakhir ini, fokus proyek ini telah berubah menjadi dukungan terhadap kesinambungan investasi melalui program pelatihan yang komprehensif dan dukungan logistik.</i></p>	Nilai Hibah	US \$ 24.7 juta
	Periode Pelaksanaan	Maret 2006 - Februari 2010
	Badan Mitra	World Food Program (WFP)
	Badan Pelaksana	World Food Program (WFP)
	Penyaluran	US \$ 24.7 juta

Proyek ini memberikan layanan pengiriman secara menyeluruh sepanjang tahun 2006. Pengiriman barang kemudian dialihkan ke sektor komersial, sementara proyek tetap melanjutkan dukungan logistik. Proyek juga terus mengoperasikan peralatan berat seperti forklift and reach stacker yang memungkinkan pembongkaran kargo secara efisien dan aman. Kini, fokus proyek ini adalah pelatihan dalam ruang kelas dan pelatihan kerja nyata bagi pegawai pelabuhan untuk memastikan pengelolaan yang baik terhadap pelabuhan dan peralatan baru.

Pencapaian sampai saat ini

Transportasi barang ke daerah yang terpencil di seluruh area yang terkena dampak bencana, termasuk pantai di Nias dan Simeulue, telah mendapatkan manfaat besar dari proyek ini. Proyek ini telah mengirimkan barang-barang sebanyak 98,185mt/256,006m³ untuk rekonstruksi pada tahun 2005 dan 2006.

Evaluasi pelabuhan dan perkiraan kebutuhan pelatihan telah selesai dilakukan. Sebuah organisasi yang mengkhususkan diri pada pelatihan di bidang pelabuhan telah teridentifikasi untuk melaksanakan pelatihan pada bulan Desember 2008. Komponen program ini akan melengkapi rekonstruksi pelabuhan di Aceh dan Nias melalui proyek Multi Donor Fund lainnya, yang rancangannya dipersiapkan oleh Program Rekonstruksi Pelabuhan UNDP dengan pendanaan melalui proyek IRFF.

Tantangan

Akan merupakan sebuah tantangan untuk memastikan perawatan dan pengoperasian peralatan berat dengan aman setelah diserahkan kepada pihak yang berwenang (contohnya petugas pelabuhan). Oleh karena itu, perubahan fokus pada program dilakukan guna meningkatkan kesinambungan melalui berbagai pelatihan.

Hasil hingga 30 September 2008	Pelayanan Pelayaran (hingga Maret 2007)*	Pelayanan Logistik (sejak 2007)
Jumlah lembaga yang menggunakan layanan pengiriman	84 pengguna	25 pengguna
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan-badan Palang Merah Internasional ▪ Badan-badan PBB ▪ LSM/ badan rekonstruksi ▪ Pemerintah ▪ Sektor swasta ▪ Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 51% 24% 18% 0.2% 0.1% 6.7% 	<ul style="list-style-type: none"> 0.6% 0.1% 2.3% 0.1% 93% 3.9%
Barang-barang rekonstruksi yang dikirimkan (hingga Desember 2006, meter kubik)	98,185*	
Pengiriman kargo yang difasilitasi melalui layanan logistik (sejak Januari 2007, meter kubik)		Sekitar 174,000



WFP menyediakan layanan perangkat dalam pembangunan kembali pelabuhan-pelabuhan. (Foto:WFP)

*WFP SS mengirimkan kapal besar kembali ke pemiliknya pada tanggal 10 Maret 2007. re-delivered the last vessel to owners on March 10th, 2007. Pemberian kemudahan untuk muatan melalui dukungan logistik dan penasehat.

11. Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP)

<i>Proyek ini memberikan rancangan fisik dan dukungan teknis lebih lanjut untuk rekonstruksi pelabuhan-pelabuhan laut dan satu pelabuhan sungai di Aceh dan Nias.</i>	Nilai Hibah	US \$ 3.8 juta
	Periode Pelaksanaan	Desember 2005 - Desember 2007
	Badan Mitra	United Nations Development Programme (UNDP)
	Badan Pelaksana	United Nations Development Programme (UNDP)
	Penyaluran	US \$ 3.8 juta

Proyek ini berfokus pada usaha rekonstruksi dengan menyiapkan rancangan yang terperinci, penilaian dampak lingkungan dan studi kelayakan ekonomi untuk rekonstruksi pelabuhan di pantai utara dan barat Aceh. Proyek juga memperbaiki fungsi beberapa pelabuhan melalui sedikit pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan dermaga sementara.

Semua kegiatan dikoordinasikan dengan BRR, Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten dan Kota serta Dirjen Perhubungan Laut dan melengkapi berbagai pekerjaan yang dilakukan di beberapa pelabuhan di Aceh. Kegiatan-kegiatan juga berdasarkan pada konsultasi erat dengan masyarakat dan perwakilan nelayan lokal dan para pemangku kepentingan kelautan lainnya.

Pencapaian sampai saat ini

Proyek ini telah menyelesaikan perancangan ulang dan penilaian yang dibutuhkan serta studi pelabuhan laut di Calang, Meulaboh, Sinabang, dan pelabuhan sungai di Lamno. Di Gunung Sitoli, proyek menilik pada rancangan terdahulu sehingga pekerjaan dapat ditenderkan. Dermaga-dermaga sementara di Calang dan Sinabang telah selesai, sehingga memungkinkan untuk berlabuh dan penyimpanan muatan yang lebih baik. Seluruh pekerjaan dari proyek ini telah selesai pada bulan Desember 2007.

Hasil pada saat penyelesaian	Target	Desember 2007
Pelabuhan yang dirancang ulang	5	5
Peningkatan kegunaan pelabuhan		
▪ area darat	2	1*
▪ dermaga sementara	2	2

* Wlayah kerja diperkecil (tidak ada pekerjaan di Balohan) sejak pemerintah daerah telah mengerjakannya



Disain untuk pelabuhan di Gunung Sitoli mulai digarap.
(Foto:Nia. S)

12. Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP)

<i>Program Transformasi Pemerintah Aceh akan memberikan bantuan strategis dan penting untuk transisi dengan memastikan bahwa pemerintah propinsi memiliki kemampuan yang diperlukan dan kekuatan institusi untuk mengambil alih proyek-proyek, aset-aset, fungsi-fungsi, kemampuan-kemampuan, dan sumber daya dari BRR serta program rekonstruksi dan perbaikan lainnya pada akhir tugas mereka.</i>	Nilai Hibah	US \$ 9.93 juta
	Periode Pelaksanaan	Mei 2008 - Desember 2009
	Badan Mitra	United Nations Development Programme (UNDP)
	Badan Pelaksana	Pemerintah Propinsi NAD
	Penyaluran	US \$ 9.93 juta

AGTP akan memperlancar tansisi BRR ke propinsi dan pemerintah daerah ketika BRR mengakhiri masa tugasnya. Proyek peningkatan kapasitas ini akan berfokus pada promosi kesinambungan investasi yang telah dilakukan oleh para donor selama proses rekonstruksi. Hal ini akan dicapai dengan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengkoordinasi berbagai program transisi yang didukung oleh para donor dan program peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan pemulihan secara efektif dengan cara mengatasi berbagai kelemahan pada pembuatan kebijakan dan juga kemampuan teknis pemerintah Aceh.

Pencapaian sampai saat ini

Pencapaian yang utama hingga saat ini adalah mulai berjalannya proyek ini. Berbagai diskusi dengan para pemangku kepentingan telah dilakukan untuk mencari persetujuan mengenai cara pelaksanaan proyek ini, yang juga merupakan kali pertama pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek ini. Dukungan kebijakan kepada kantor Gubernur Aceh diberikan untuk memastikan kelancaran transisi dari BRR kepada pemerintah daerah dan tim penasihat bekerja di 7 lembaga pemerintahan daerah. Salah satu bantuan khusus adalah dukungan yang diberikan dalam mempersiapkan draft keputusan presiden yang akan menentukan lembaga/institusi yang akan mengambil alih berbagai fungsi BRR.

Tantangan

Tantangan utama AGTP adalah keterbatasan kapasitas dari pemerintah propinsi yang baru dibentuk. Sementara ini, keterbatasan meliputi tidak adanya peraturan mengenai prosedur penyerahan dana hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan kurangnya kapasitas kelembagaan di lembaga pemerintah daerah untuk mengelola dana dalam jumlah besar.



Proses wawancara merupakan salah satu upaya fit & proper test untuk para calon tim penasehat Gubernur NAD
(Foto:UNDP)

13. Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal Pedesaan

<p><i>Proyek ini membangun kapasitas pemerintah daerah dan kontraktor lokal untuk merekonstruksi dan memelihara jalan dengan metode yang menggunakan teknologi sederhana. Proyek rehabilitasi jalan-jalan kabupaten di lima kabupaten di Aceh dan Nias, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, menciptakan kesempatan kerja jangka pendek dan jangka panjang.</i></p>	Nilai Hibah	US \$ 11.8 juta
	Periode Pelaksanaan	Januari 2006 - Desember 2009
	Badan Mitra	United Nations Development Program (UNDP)
	Badan Pelaksana	International Labor Organization (ILO)
	Penyaluran	US \$ 11.8 juta

Proyek ini menitikberatkan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan para kontraktor lokal di Aceh dan Nias dengan memberikan teknik, standar, sistem, dan strategi serta melibatkan penduduk dalam pengerjaan dan pemeliharaan jalan-jalan kabupaten dan di pedalaman lainnya.

Proyek ini memberikan kesempatan kerja jangka pendek pada bidang rehabilitasi jalan-jalan dan peluang kerja jangka panjang pada pemeliharaan jalan. Hal ini membutuhkan keterlibatan sungguh-sungguh dari para pemangku kepentingan termasuk keterlibatan penduduk sebagai bagian penting dari perencanaan dan proses pelaksanaan di lapangan.

Pendekatan dengan menggunakan sumber daya lokal dan sistem pemeliharaan jalan yang melibatkan penduduk telah diterapkan dalam pembuatan jalan yang dilakukan oleh para kontraktor lokal yang dikontrak oleh ILO. Pencapaian tujuan awal memungkinkan proyek ini diperpanjang ke tahap ke dua hingga akhir tahun 2009, dengan penambahan 3 kabupaten baru.

Pencapaian sampai saat ini

Proyek ini telah berhasil merangkul para pegawai pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas berdasarkan metode pendayagunaan sumber daya lokal ditingkat kabupaten dimana proyek beroperasi. Kegiatan-kegiatan pelatihan mengenai manajemen kontrak, pembangunan jalan, dan teknik pengawasan pembangunan disediakan secara berkesinambungan bagi para insinyur dan pengawas dari pemerintah tingkat kabupaten yang bersangkutan. Pedoman dan panduan telah dibuat dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dari pelaksanaan.

Tantangan

Proyek ini menarik minat besar pemerintah dan para kontraktor. Tantangan utamanya adalah memastikan diterapkannya pendekatan pendayagunaan sumber daya lokal dalam melakukan perbaikan dan pembangunan jalan dan untuk memperkenalkannya sebagai praktek umum dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur lainnya dalam volume besar.

Hasil Per 30 September, 2008	Target	Pencapaian
Jumlah jalan yang diperbaiki (km)	98	95,3
Jumlah jalan yang mendapat perawatan (km)	98	97,3
Jumlah kontraktor lokal yang dilatih	80	186
Jumlah pegawai pemerintahan lokal yang dilatih		
▪ Para Insinyur dan para Pengawas untuk pengelolaan kontrak dan pengawasan pembangunan (% wanita)	60 (30%)	115 (2%)
▪ Pegawai yang dilatih dalam mengelola infrastruktur (% wanita)	15 (30%)	67 (20%)
Jumlah hari kerja yang diciptakan	300,000	218,636
Komposisi Pria/Wanita		73%/27%



Pembangunan jalan di Nias
(Foto:ILO)

14. Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)

<i>Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten untuk mendorong pembangunan jangka panjang di propinsi. Proyek ini menghubungkan proses perencanaan partisipatif kecamatan di PPK dengan pembuatan keputusan pemerintah kabupaten dan menyediakan hibah untuk meningkatkan layanan publik dan pemulihan infrastruktur perekonomian.</i>	Nilai Hibah	US \$ 25.00 juta
	Periode Pelaksanaan	Februari 2007 - Juni 2010
	Badan Mitra	Bank Dunia
	Badan Pelaksana	Kementrian Daerah Tertinggal melalui BRR
	Penyaluran	US \$ 4.08 juta

Kapasitas pemerintah kabupaten dalam memberikan layanan publik yang memadai masih rendah. Merupakan hal penting dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan secara jangka panjang. Proyek ini memberikan hibah ke semua kabupaten di Aceh dan Nias untuk mendanai proyek yang lebih besar dan sulit, secara teknis muncul dari perencanaan kecamatan melalui mekanisme PPK.

Proyek ini dipilih oleh komite pembangunan kabupaten dengan menyisihkan tiga puluh persen hibah untuk kesehatan dan pendidikan. Proyek juga akan mendorong perbaikan iklim ekonomi melalui investasi infrastruktur. Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, kombinasi dari pelatihan, kegiatan praktek lapangan dan dukungan teknis akan ditawarkan selama proyek berlangsung.

Pencapaian sampai saat ini

P2DTK telah melakukan banyak kegiatan di 17 kabupaten di Aceh dan 2 di Nias dimana kantor proyek telah didirikan. Forum-forum penasehat di tingkat kabupaten yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan telah dibentuk untuk memberikan masukan kepada Dewan Pembangunan Kabupaten. Suatu kerjasama antara P2DTK-BRR-Sekretariat Pemerintah Daerah telah dibentuk di seluruh kabupaten dan kota dimana konsultan kesehatan dan pendidikan telah dilatih dan telah menghasilkan penilaian kebutuhan untuk sektor-sektor tersebut.

Sebuah perjanjian bantuan telah dibuat dan diharapkan akan ditandatangani pada kuartal ke-2 dengan RTI untuk melaksanakan Program Dukungan USAID-Pemerintah Daerah di 10 kabupaten. Dua kantor regional telah didirikan, proses perekrutan pegawai telah dilakukan dan dua lokakarya telah dilakukan di 2 wilayah yang mencakup 6 kabupaten.

Proyek ini juga telah memberikan hibah perencanaan kepada semua kabupaten. Hibah ini akan menunjang upaya pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pada proses partisipasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari badan pemerintahan, masyarakat madani, universitas dan perwakilan kecamatan. Setelah kegiatan perencanaan kabupaten selesai, proyek akan menyalurkan hibah pada kuartal pertama 2008 untuk membangun infrastruktur fisik, kesehatan, dan pendidikan.

Tantangan

Proyek ini mengalami keterlambatan yang signifikan karena kondisi yang tidak memungkinkan pada waktu itu. Tantangan yang terus menerus dihadapi di lapangan adalah memastikan koordinasi yang baik untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan yang dilakukan oleh P2DTK dan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya. Disamping itu, P2DTK akan menghadapi tantangan dalam melibatkan sumber daya pemerintah daerah ketika para pegawai negeri memusatkan perhatian pada proses transisi mempersiapkan pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada saat yang bersamaan.



Meningkatkan kapasitas bidan melalui pelatihan.
(Foto: Budi Hermawan)

15. Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh dan Nias

<i>Proyek ini membangun kapasitas teknis dan keorganisasian Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat di Aceh dan Nias. Hibah berskala kecil memungkinkan LSM dan Ormas untuk terlibat dalam kegiatan rekonstruksi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.</i>	Nilai Hibah	US \$ 6.0 juta
	Periode Pelaksanaan	Desember 2005 – Februari 2010
	Badan Mitra	United Nations Development Programme (UNDP)
	Badan Pelaksana	United Nations Development Programme (UNDP)
	Penyaluran	US \$ 6.0 juta

Proyek ini juga memberikan dukungan kepada LSM dan jaringan mereka untuk membangun Pusat Sumber Daya Lokal sebagai pusat koordinasi untuk kegiatan, pertukaran, pelatihan, dan dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat madani. Organisasi Masyarakat Madani akan berpartisipasi dalam pelatihan dan bersaing untuk mendapatkan hibah berskala kecil yang dapat digunakan untuk mengawasi kegiatan rekonstruksi atau sebagai hibah pembangunan masyarakat. Dengan cara ini, proyek dapat mendukung inisiatif-inisiatif seperti membangun pelayanan sosial dasar dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Pencapaian sampai saat ini

Telah terdapat kemajuan yang signifikan dalam kegiatan-kegiatan proyek sepanjang tahun 2008. Pusat Sumber Daya Masyarakat (The Civil Society Resource Center) di Aceh dan Nias telah didirikan dan beroperasi. Di Aceh, 716 orang yang mewakili 125 Organisasi Masyarakat Madani mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas. Pelatihan-pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusat Sumber Daya, bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dan pengembangan organisasi. Semua penyedia layanan yang dibutuhkan oleh program telah dikontrak dan 144 Organisasi Masyarakat Madani telah menerima bantuan kecil. Lokakarya dialog wacana telah menyediakan kesempatan untuk meningkatkan kolaborasi antara Organisasi-organisasi Masyarakat Madani dengan pemerintah. Sebuah tinjauan tengah tahun telah dilakukan pada bulan Agustus, dilanjutkan dengan perencanaan kegiatan-kegiatan dialog untuk mensosialisasikan temuan-temuan. Sekitar 80 persen dari target Organisasi Masyarakat Madani telah menerima bantuan kecil.

Tantangan

Sebuah perhatian khusus diperlukan dalam memastikan keberlanjutan bantuan dana dan pengelolaan pusat-pusat sumber daya di Aceh dan Nias. Sebuah tantangan yang lain adalah memastikan bahwa masa berakhir BRR tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan proyek. UNDP telah melakukan diskusi-diskusi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran transisi.

Hasil hingga 30 September, 2008	Pencapaian
Hibah kecil yang diberikan/nilai hibah	144/US \$ 1.173 juta
Penerima hibah mata pencaharian	6,693 pria/ 5,425 wanita
Pegawai CSRC yang dilatih (latihan untuk pelatih)	50 (18 wanita)
Pegawai CSO yang dilatih	716 (192 wanita)



CSO
Hibah mini kepada masyarakat untuk peningkatan keahlian menjahit.
(Foto:UNDP)

16. Program Bantuan Teknis untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias (TA to BRR)

<i>Program Bantuan Teknis untuk BRR mendukung Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk melaksanakan mandatnya secara efisien dalam perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan koordinasi proses pemulihan melalui pemberian bantuan teknis dan layanan-layanan penting.</i>	Nilai Hibah	US \$ 22.5 juta (2 fase)
	Periode Pelaksanaan	Juli 2005 – Mei 2009
	Badan Mitra	United Nations Development Programme (UNDP)
	Badan Pelaksana	BRR
	Penyaluran	US \$ 22.5 juta

Proyek ini memungkinkan BRR untuk meningkatkan kualitas operasionalnya dan melaksanakan program rekonstruksi pemerintah di semua sektor yang relevan. Proyek menyediakan ahli-ahli nasional dan internasional yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik BRR, baik di kantor pusat maupun kantor regional BRR. Dukungan proyek terdiri dari (i) rekrutmen konsultan perorangan, (ii) pengadaan layanan-layanan penting untuk operasi BRR, dan (iii) meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Pencapaian sampai saat ini

Hingga saat ini, proyek telah mempekerjakan 80 ahli teknis untuk membantu berbagai departemen di BRR dalam kegiatan pelaksanaan dan transisi. Proyek ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek yang sedang berjalan. Fokus utama dari proyek ini telah beralih pada dukungan terhadap Departemen Pengalihan Aset dan Manajemen Pengetahuan dengan penekanan pada peralihan aset dan tanggung jawab setelah masa akhir BRR.

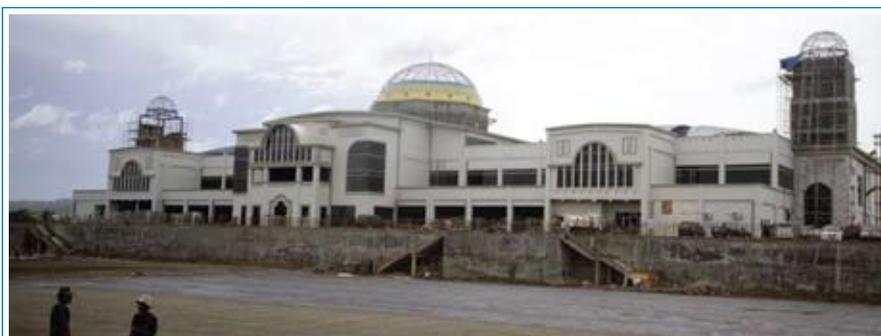
Layanan operasional seperti bantuan hukum, bantuan untuk mengelola SDM dan layanan Teknologi dan Informasi tetap beroperasi seperti biasa untuk mengamankan fungsi BRR hingga masa berakhirnya. Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan telah dilakukan pada bulan September 2008.

Tantangan

Proyek ini mengalami tantangan dalam mencari konsultan yang cocok untuk tim pengalihan aset. Perkembangan tim ini juga tergantung pada keputusan presiden mengenai masa akhir BRR. Keberlanjutan dari inisiatif BRR yang didukung oleh proyek ini telah menjadi prioritas.

Hasil hingga 30 September, 2008	Pencapaian
Bantuan untuk pedoman, strategi dan pengembangan kebijakan	212
Proyek BRR yang dimonitor kualitasnya	275
Proposal proyek yang ditinjau	188
Keluarga yang direlokasi (persentasi dari target sejumlah 16,606)*	11,574 (70%)
Pertemuan sosialisasi yang diadakan	25

* mengacu pada kondisi yang dinamis, jumlah target selalu berkembang.



The project provided technical assistance to build a new international airport
(Foto:UNDP)

17. Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup (AFEP)

<p><i>Proyek ini membantu melindungi ekosistem hutan Leuser dan Ulu Masen dari pembalakan liar. Perlindungan yang baik untuk 3,3 juta hektar wilayah hutan akan membantu mengamankan pasokan air bagi 60% penduduk Aceh dan juga menjaga keanekaragaman hayati terbesar di Asia Tenggara.</i></p>	Nilai Hibah	US \$ 17.5 juta
	Periode Pelaksanaan	Februari 2006 – Juni 2010
	Badan Mitra	Bank Dunia
	Badan Pelaksana	Leuser International Foundation; Fauna and Flora International
	Penyaluran	US \$ 8.4 juta

Proyek berupaya untuk menyeimbangkan perlindungan hutan, manfaat ekonomi dan kesempatan penghidupan untuk masyarakat lokal. Perlindungan berdasar pada kerangka tata kelola multi-pihak, pengawasan hutan dan pengelolaan hutan lestari. Kegiatan meliputi peningkatan kapasitas bagi badan pengelolaan hutan dan taman pemerintah. Kelestarian lingkungan akan didorong lebih lanjut melalui dukungan rencana tata ruang, kampanye kesadaran lingkungan, kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat dan melalui analisis penggunaan perdagangan karbon sebagai mekanisme pendanaan untuk konservasi.

Pencapaian sampai saat ini

Proyek ini telah mengembangkan basis untuk status ekosistem Leuser dan Ulu Masen; pada akhir tahun 2006, 69% dari kedua ekosistem telah dikategorikan sebagai hutan yang belum terjamah. Peta untuk tahun 2007 masih dipersiapkan.

Sukses yang signifikan telah dicapai dalam mendukung dan meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tata kelola ekosistem hutan dalam berbagai tingkatan melalui pelatihan, memfasilitasi pertemuan-pertemuan, dan pengadaan lokakarya-lokakarya. Proyek ini juga telah memberikan kontribusi yang positif ke dalam inisiatif kunci lingkungan (seperti pemasaran pertukaran karbon) melalui bantuan teknis dan kerjasama yang kuat. Kegiatan-kegiatan rencana tata ruang telah memberikan kontribusi dalam perbaikan rencana propinsi dan kabupaten melalui berbagai macam cara, termasuk konflik manusia dengan alam dan penguatan peran mukim. Banyaknya kegiatan-kegiatan lingkungan dan konservasi telah dilakukan dan kegiatan-kegiatan penanaman hutan kembali terus berlanjut.

Tantangan

Proyek ini mencakup wilayah yang luas dan terpencil, sehingga membebani para petugas untuk mengawasi dan membuat laporan atas wilayah tersebut. Untuk mendukung keberlanjutan perlindungan, alternatif mata pencaharian sebagai pengganti dari pembalakan liar memerlukan intervensi diluar cakupan proyek ini. Sebagai tambahan, pembebasan hutan untuk perkebunan dan jalan-jalan yang baru adalah ancaman, dan penekanan agar proyek tetap fleksibel dalam menjaga ekosistem Leuser dan Ulu Masen.

Hasil hingga 30 September, 2008	Target hingga 2010	Pencapaian
Perencanaan tata ruang (tingkat masyarkat/tingkat kabupaten)	40 desa/ 10 mukim/ 7 kota	2 rencana desa telah selesai (LIF)/ 3 rencana mukim telah selesai (FFI)/1 rencana kota telah selesai (FFI) & memberikan kontribusi terhadap 2 rencana kota yang saat ini juga telah selesai (FFI)
Guru yang dilatih mengenai konservasi (persentase guru wanita)	500	476 (56.9%)
Kelompok lingkungan (Eco-club) sekolah yang dibentuk (jumlah anggota)	500	19 kelompok lingkungan (1896)
Penjaga Hutan (jagawana) dari Pemerintah yang dilatih (jumlah wanita):Petugas Konsepasi/kehutanan yang dilatih (jumlah wanita)	1,000	179 (14 wanita)
Pemantau masyarakat yang dilatih (jumlah wanita)	15	11 (1 wanita)
Hutan yang telah direboisasi (ha)	5,000	741ha



MONITORING HUTAN

Tim Community Based Monitoring FFI sedang memantau titik munculnya api dan jejak pembakar hutan padang rumput Blang Raweu. Padang Rumput Blang raweu merupakan salah satu habitat hutan savana yang terdapat didalam kawasan Ekosistem Ulumasan yang kerap dibakar oleh pemburu-pemburu rusa. MDF mendanai pelatihan penjaga hutan dan pelaku konservasi sejak 2006. (Foto:Mahdi Ismail - FFI)

18. Program Pengelolaan Limbah Tsunami (TRWMP)

<i>Program Pengelolan Limbah Tsunami membangun kapasitas pemerintah dalam mengelola limbah, menciptakan lapangan kerja dan menciptakan sumber mata pencaharian jangka panjang melalui pengelolaan limbah serta memberikan manfaat bagi lingkungan melalui pengumpulan, pemulihan dan daur ulang limbah.</i>	Nilai Hibah	US \$ 24.4 juta
	Periode Pelaksanaan	September 2005 - Desember 2010
	Badan Mitra	United Nations Development Programme (UNDP)
	Badan Pelaksana	United Nations Development Programme (UNDP)
	Penyaluran	US \$ 19.4 juta

Proyek ini menyediakan respon yang terkoordinasi terhadap masalah kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari limbah tsunami dan gempa bumi, serta limbah padat kotamadya. Sebagian besar dari limbah bencana didaur ulang, dengan potensi penggunaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Proyek ini juga menciptakan lapangan kerja melalui “uang untuk pekerjaan” dan mata pencaharian yang berkelanjutan dalam kegiatan yang terkait dengan daur ulang. Tahap kedua proyek akan memberikan tekanan pada layanan limbah kotamadya yang berkelanjutan dengan focus meningkatkan kapasitas kegiatan operasional dan pemeliharaan.

Pencapaian sampai saat ini

Proyek ini telah berhasil mengangkut 20% limbah yang diakibatkan oleh tsunami di Aceh, sehingga memungkinkan 1,400 keluarga dapat kembali bekerja di ladang dan tambak mereka serta mengurangi resiko lingkungan dan kesehatan. Dinas kebersihan kotamadya di delapan kabupaten telah mendapatkan dukungan lebih lanjut melalui pembangunan atau perbaikan TPA sementara. Dalam fase yang baru, pemerintah daerah akan mendukung untuk membangun TPA permanen.

Tantangan

Tantangan utama proyek ini adalah penyediaan layanan yang berkelanjutan dengan memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengelolaan limbah, melalui dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagai tambahan, diskusi-diskusi mengenai pembangunan lahan sedang dilakukan dengan para pemangku kepentingan.

Hasil hingga 30 September, 2008	Target	Pencapaian
Sampah tsunami yang dibersihkan (meter kubik)	1,000,000	1,132,863
Sampah kota yang dikumpulkan (meter kubik)	300,000	161,432
Jumlah dan ukuran TPA sementara (ha)	13 (24ha)	12 (25 ha)
Sawah/tambak yang direhabilitasi (ha)	3,000	891
Gedung-gedung swasta dan pemerintah yang dihancurkan (unit)	500 10,000/	553 18,204/ 3,371
Kayu limbah tsunami yang dikumpulkan dan diproses untuk daur ulang (meter kubik)	5,000	235,000
Kompos pertanian yang diproduksi (kg)	1,000,000	99
Reruntuhan yang didaur ulang untuk pembangunan jalan (jarak km dari jalan)	50	400,000
Total pekerjaan jangka pendek Rata-rata orang yang dipekerjakan per hari semenjak dimulainya proyek (jumlah hari kerja)/ pekerja wanita/ pengungsi internal (IDP) yang dipekerjakan (%)	1000 30%/ 25%	695 19%/14%
Jumlah SME dengan daya tahan mata pencaharian yang dihasilkan oleh sektor Pengelolaan Limbah	200	120



MENGEPAK PLASTIK DAUR ULANG

Seorang pemulung yang telah dilatih keahliannya dalam mengenali jenis dan kualitas plastik, dengan giatnya melakukan pengepakan terhadap sampah daur ulang untuk dijual kembali. Proyek ini merupakan kerjasama Palapa Plastic Recycle dengan Austcare yang merupakan mitra dalam mengimplementasikan proyek UNDP untuk program pengelolaan sampah yang didanai MDF. Program ini memberikan pendapatan harian ke kurang lebih 700 orang.]
(Foto: Herlina Sjaifudin)

DAFTAR SINGKATAN

ACAP	Rencana Aksi Anti Korupsi (Anti Corruption Action Plan)
AFEP	Proyek Hutan Aceh & Lingkungan Hidup (Aceh Forest and Environment Project)
AGTP	Program Transformasi Pemerintah Aceh (Aceh Government Transformation Programme)
AMDAL	Environmental impact assessment according to GOI standards
BAFMP	Banda Aceh Flood Mitigation Project
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPKP	National Board for Controlling Development Finance (state auditor)
BNP	Badan Pertanahan Nasional
BRA	Badan Reintegrasi Aceh
BRR	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias
CFAN	Coordination Forum for Aceh-Nias
CHU	Unit Penanganan Keluhan (Complaint Handling Unit)
CSO	Organisasi Masyarakat Madani (Civil Society Organization)
CTC	Community Trustee Committee
DFID	Department for International Development of the United Kingdom
DIPA	Daftar Isian Penggunaan Anggaran
DMC	District Management Consultants
EC	European Commission
FFI	Fauna and Flora International
GIS	Geographic Information System
GOI	Government of Indonesia
ILO	International Labour Organisation
IPM	Infrastructure Program Management consultants of IREP
IT	Information Technology
IREP	Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur
IRFF	Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur
ISR	Implementation Status and Results Report
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KRRP	Proyek Pengembangan Kecamatan di Nias (Nias Kecamatan-based Reconstruction and Recovery Planning Project)
LGSP	Local Government Support Program
LIF	Leuser International Foundation
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDF	Multi Donor Fund for Aceh and Nias
M&E	Monitoring and Evaluation
MIS	Management Information System
MoU	Memorandum of Understanding
NGO	Non-Governmental Organization
P2KP	Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
PAD	Project Appraisal Document
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCN	Project Concept Note
PPK	Program Pengembangan Kecamatan
RAP	Kebijakan Bantuan Pemulihan (Recovery Assistance Policy)
RALAS	Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (Reconstruction of the Aceh Land Administration System Project)
REKOMPAK	Rehabilitasi & Rekonstruksi Perumahan Masyarakat
SDLP	Program Angkutan Laut dan Logistik
SEK	Swedish Kronor
SMS	Short Message Service
SPADA	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
TA	Bantuan Teknis (Technical Assistance)
TA to BRR	Technical Support for Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
TRPRP	Program Rekonstruksi Pelabuhan
TRWMP	Program Pengelolaan Limbah Tsunami
UK	United Kingdom
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Programme
UPP	Urban Poverty Project
WALHI	Friends of the Earth Indonesia – Indonesian Environmental NGO (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)
WFP	World Food Programme



Republic of Indonesia



BRR



European Commission



Netherlands



United Kingdom



Canada



World Bank



Sweden



Norway



Denmark



Germany



Belgium



Finland



ADB



United States of America



New Zealand



Ireland

www.multidonorfund.org

Hubungi Sekretariat Multi Donor Fund

Kantor Jakarta

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 13 | Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia | Phone: +62 21 5299 3000

Kantor Aceh

World Bank Office Aceh | Jl. Peurada Utama No. 11A, Gampong Peurada, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh 23115, Indonesia | Phone: +62 651 755 1176

mdf-indonesia@worldbank.org | www.multidonorfund.org